

# **SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG  
PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM  
MEMUNGUT RETRIBUSI PARKIR**

**OLEH  
AULIA BISRI AGUSSALIM  
B 121 12 171**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN  
PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM MEMUNGUT RETRIBUSI  
PARKIR**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Oleh  
**AULIA BISRI AGUSSALIM**  
**B 121 12 171**

**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM MEMUNGUT RETRIBUSI PARKIR**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AULIA BISRI AGUSSALIM**

**B121 12 171**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 22 April 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**

  
**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si**  
**NIP. 19640824 199103 2 002**

**Sekretaris,**

  
**Ruslan Hambali, S.H., M.H.**  
**NIP. 19561110 198303 1 003**

**A.n. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Aulia Bisri Agussalim

Nomor Pokok : B121 12 171

Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Memungut Retribusi Parkir

Telah Diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2016

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.**  
**NIP. 19640824 199103 2002**

**Pembimbing II**



**Ruslan Hambali, S.H., M.H.**  
**NIP. 19561110 198303 1 003**

## PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **AULIA BISRI AGUSSALIM**  
No. Pokok : B121 12 171  
Prodi : Hukum Administarsi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Memungut Retribusi Parkir

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2016

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003 

## **ABSTRAK**

**AULIA BISRI AGUSSALIM (B12112171) , Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Terpi Jalan Umum Dalam Memungut Retribusi Parkir. Di bawah bimbingan ibu Marwati Riza, Selaku Pembimbing I, dan Bapak Ruslan Hambali Selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di Kota Makassar telah berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas PD.Parkir terhadap Perusahaan Daerah Parkir dalam memungut retribusi Parkir.

Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan beberapa lokasi parkir yang ada di kota Makassar. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan di analisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi Parkir di kota Makassar belum optimal karena Tingginya target yang di tetapkan oleh PD.Parkir tidak menjamin banyaknya hasil yang mereka peroleh. Selain itu juga banyaknya kolektor yang melakukan permainan terhadap target yang telah ditentukan oleh PD.Parkir sehingga tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu, Pengawasan yang di lakukan PD.Parkir tidak mewujudkan efektifitas, karena PD. Parkir Kota Makassar memiliki personil yakni Colector (juru tagih) yang justru melakukan penagihan setiap hari. Semestinya dalam rangka efektifitas pengawasan, PD. Parkir tidak lagi perlu membentuk pengawas, cukup memberikan tugas pengawasan kepada colector

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin

Penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Namun maksimalnya usaha dan doa penulis, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar ke depannya dapat membuahkan tulisan yang lebih baik. Amin

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayah Drs. H. Bisri Agussalim dan (Almh) Ibu tercinta Ir.Hj.Sitti Rusmaniah, MP yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung serta memotivasi penulis selama ini. Semoga kedepannya penulis dapat membalas keringat dan kerja keras yang telah kedua orang tua penulis lakukan demi mewujudkan keinginan penulis

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, staf serta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum



Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

4. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Ruslan Hambali, SH.,MH. selaku pembimbing II, terima kasih atas segala kesabaran, petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diuangkan untuk penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H., Bapak Kasman Abdullah, S.H., M.H. serta Bapak Zulfan Hakim S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
7. Bapak Syafrullah, SE selaku Direktur Operasional Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan stafnya yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Muhammad Dzakwan selaku adik tercinta, serta keluarga yang telah menemani hari-hari penulis, memberikan kasih sayang, semangat, dukungan kepada penulis.
9. Andy Irwan Prasetyo, SE Terima kasih atas segala saran, bantuan dan semangat serta canda tawa dan kebersamaan yang diberikan, terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis.

10. Sahabat-sahabat 10 CM Bambang, Fika, Lulu, Yasin, Waris, Rifqa, Olda, Rifky yang telah mengisi hari-hari penulis, mengajarkan arti persahabatan, canda tawa dan pertengkaran sudah kami lalui terima kasih atas kebersamaan, semangat serta dukungan yang diberikan, penulis beruntung bisa mengenal kalian.
11. Teman-teman di Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas kebersamaannya, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis, semoga kesuksesan dapat kita raih bersama.
12. Teman-teman BSDK FH-UH terima kasih kebersamaannya, pengalaman, ilmu, semangat serta persaudaraan yang telah dibangun, terima kasih sudah memberikan makna di kehidupan perkuliahan penulis.
13. Teman-teman SMA 21 Makassar terutama buat anak SOS 1 Kasmawati SH, Rara, Nurul, Anna, Tata, Fathir, terima kasih canda tawa, kebersamaan, kemitosan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Kelompok 4 magang di Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Yasiin, Rifqa, Waris, Dian, Ahmad, Olda, Ichfaq terima kasih canda tawa, kebersamaan, semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman KKN gelombang 90 Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, terutama buat teman Posko Induk Kelurahan

Sangiasseri Caca, Kiki, Abi, Ipul, Uswa, Amel, Ary, Idul Terima kasih  
Kebersamaannya canda tawa bantuan dan persaudaraannya selama  
di lokasi KKN.

Dan akhirnya penulis hanya bias mengucapkan terima kasih yang  
sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan,  
semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Makassar, 12 April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	 8
A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah.....	8
B. Pengertian Pengawasan .....	22
C. Tinjauan Umum Keuangan Daerah.....	28
D. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah.....	30
E. Retribusi Daerah .....	37
F. Retribusi Parkir .....	42
G. Pajak Parkir .....	52
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	 53
A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data .....	53
C. Populasi dan Sampel .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	56

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 dalam Pemungutan Retribusi Parkir .....	57
B. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pengawas PD.Parkir Terhadap Juru Parkir dalam Memungut Retribusi Parkir .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tarif Parkir Perusahaan Daerah.....	50
Tabel 2 Titik Parkir Dikota Makassar.....	57
Tabel 3 Target Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2015 .....	64
Tabel 4 Nama-nama Tim Pengawas.....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945), “Negara Indonesia ialah Negara Hukum.”Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketatanegaraan haruslah senantiasa berlandaskan pada hukum. Penggunaan istilah Negara hukum ini dikenal dengan konsep *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental; atau *The Rule Of Law* di Negara-negara *Anglo Saxon*; dan di Negara-negara sosialis disebut sebagai *Socialist Legality*.<sup>1</sup>Implikasi dari pernyataan suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum adalah segala tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara haruslah senantiasa berlandaskan pada hukum dan warga negara selaku manifestasi dari suatu negara berhak untuk melakukan pernyataan keberatan atas segala tindakan pemerintah melalui mekanisme yang diajukan pada suatu badan peradilan.

Selain secara tegas menyatakan kedudukannya sebagai negara hukum, Indonesia juga dengan tegas menyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah NegaraKesatuan, yang berbentuk Republik.” dan Pasal 37 ayat(5)

---

<sup>1</sup> Achmad Ruslan, 2011, “Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal. 19.

“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilaksanakan amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diawali dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya yaitu tidak mengganti bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedikitpun & terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk final negara Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan namun terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong otonomi daerah dan mendorong pembangunan daerah menjadi lebih pesat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal pertahanan, keamanan, moneter, politik luar negeri, pendidikan, dan agama.<sup>2</sup>

Pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif

---

<sup>2</sup>Ray Pratama Siadari, 2010, *Konsepsi Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 3 No. 012. Tahun 2010, Makassar, hlm. 87.

sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dana kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk memungut pajak dan retribusi daerah pemerintahan dan DPR sejak lama telah lama mengeluarkan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memang memungkinkan penerapan peraturan perundang-undangan

yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Reformasi dalam peraturan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia perlu dilakukan agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pemerintah daerah.

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari sektor jasa perpajakan.

Perkembangan Makassar dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap sektor kepemilikan kendaraan di Makassar yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktifitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat



akan lahan parkir, sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbang nya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang presentatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir.

Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Banyaknya bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Makassar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan.

Dalam peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum telah diatur kewenangan kepada direksi untuk mengelola parkir tepi jalan umum. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didirikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pengelolaan retribusi parkir. Sesuai dengan tugas pokok dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengandalkan mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kegiatan di bidang perparkiran

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari

masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak secara resmi terdaftar di PD.Parkir sebagai kawasan peparkiran serta permasalahan retribusi parkir tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Pungutan parkir dapat dikenakan kapan saja dan dimana saja, meskipun petugas parkir tidak dilengkapi dengan bukti tanda parkir.

Berdasarkan urian di atas sehingga penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Memungut Retribusi Parkir”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan perda Nomor 17 Tahun 2006?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PD Parkir terhadap juru parkir dalam memungut retribusi parkir ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Mengacu paada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini bisa penulis gambarkan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar telah berjalan optimal sesuai dengan perda Nomor 17 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PD Parkir terhadap juru parkir daam memungut retribusi parkir

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Memberikan suatu pengarahan yang definitive dan mantap dalam suatu penelitian.
2. Memberikan ruang lingkup yang tegas, dan merupakan suatu patokan untuk dapat memilih unsur-unsur yang relevan bagi peneliti.
3. Memberikan tujuan yang tegas bagi peneliti,yang akan melakukan penelitian,
4. Dapat mencegah pengumpulan data yang tidak ada hubungannya dengan tujuan serta hakikat penelitian yang akan dilaksanakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

##### 1. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 cirihakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Koesoemahatmadja berpendapat, bahwa:<sup>3</sup>

“Menurut perkembangan sejarah di Indonesia otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*)”.

Dalam literatur Belanda otonomi berarti “pemerintahan sendiri” (*Zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membentuk Undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan

---

<sup>3</sup> Sarundajang, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000. Hal. 33.

sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri).<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah, menghendaki pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-undang. Soepomo menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai histories dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Rozali, Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 11

<sup>6</sup> Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974



berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam, sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah-daerah otonom. Mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/ kewenangan untuk membuat peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak/kekuasaan/ kewenangan pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang- undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya

sendiri.<sup>7</sup> Hal yang diatur dan diurus tersebut adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakannya sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri.

Teknik yang dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan yang mana merupakan wewenang pemerintah daerah, adalah Sistem Otonomi Riil. Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan atas keadaan yang riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali pada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam:

---

<sup>7</sup> Kaho, J. R., Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers – PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hal. 25

- a. Daerah Provinsi sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Daerah Provinsi yang dahulu disebut Provinsi daerah Tingkat I sekarang disebut Provinsi.
- b. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, yaitu Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang berlaku selama ini diganti dengan sebutan Kabupaten atau Kota.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang dipakai yaitu:

- a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- c. Asas Tugas Pembantuan dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, daerah Kota dan Desa (Penjelasan Undang-Undang Umum Pemerintah Daerah).

Prinsip-prinsip tersebut di atas menunjukkan bahwa khusus untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, prinsip yang selama ini dijalankan yaitu melaksanakan asas desentralisasi berdampingan dengan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak berlaku lagi, karena penyelenggaraan asas desentralisasi di daerah Kabupaten dan Daerah Kota dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam Undang- Undang Dasar 1945, antara lain adalah:

a. Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

b. Pasal 18 yang menyatakan :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ditetapkan antara lain :

1. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Di daerah yang bersifat otonom (*streek and localerecht gemeenshapper*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan gambaran bahwa besar dan luasnya daerah otonom, serta hubungan wewenang dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dibatasi dengan menghindari daerah-daerah otonom yang menjadi negara dalam Negara dalam hal ini bentuk federasi. Namun demikian, meski Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 tidak mengatur mengenai pemerintahan wilayah atau dekonsentrasi, sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting mengingat dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di Daerah.<sup>8</sup>

Semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang sudah banyak Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.

---

<sup>8</sup>Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994. Hal. 160-162.

<sup>9</sup>C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet. Pertama (edisi revisi), PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003 Hal. 78.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD-Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah.
- j. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dibuat di era reformasi kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah melaksanakan asas desentralisasi berdampingan asas dekonsentrasi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan desentralisasi.

Adapun pokok pikiran dalam penyusunan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Daerah Provinsi, sedangkan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- c. Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam Daerah otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada di dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
- d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

Secara garis besar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur lebih rinci atau detail mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. seperti yang tertuang dalam dasar pemikiran

Undang-undang 23 Tahun 2014 dimana Pemerintah Daerah diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, serta perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

## **2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Pada mulanya keberadaan AAUPB ini di Indonesia diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika

pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas itu dimasukan sebagai salah satu gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha Negara. Akan tetapi putusan ini ditolak oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail selaku Menteri Kehakiman saat itu. Alasan tersebut adalah sbb:



“Menurut hemat kami, dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam Hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai criteria tentang algemene beginselen van behoorlijk bestuur tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum memiliki tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum prinsip dari Hukum Tata Usaha Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret”.

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Pemerintahan dengan Sistem Otonomi Daerah**

Dalam perkembangannya, baik pada masa pemerintahan Orde lama maupun Orde baru, tergambar tantangan yang dihadapi oleh gagasan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang sangat luas sehingga penyelenggaraan pemerintahan cenderung kearah sentralistik.

Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dan kota seperti ini adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar pada masa pemerintahan Orde baru

telah menimbulkan masalah rendahnya kpaabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam menndorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arah dan statutory requitment yang terlalu besar dari pemerintahan pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mai sehingga pemerintah daerah sering menjadikan pemenuhan peraturan sebagi tujuan, dan bukan sebagi alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Besarnya arahan pemerintahan pusat itu di dasarkan pada dua alasan utama, yaitu menjamin stabilitas nasional dan kondisi sumber daya manusia di daerah yag dirasakan masih relative rendah. Karena dua alasan ini, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat umum menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada awalnya , pandangan ini terbukti pada tahun 70an dan 80-an misalnya, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. Akan tetapi dalam waktu yang panjang, sentralisasi seperti ini memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur social dan tingkat pengembalian proyek-proyek public, serta memperlambat kelembagaan social ekonomi dan di daerah.

Kedua, tuntutan ekonomi juga muncul sebagai jawaban umum memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek kehidupan manusia yang akan datang. Pada era seperti ini peemerintah semakin

kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti perdagangan internasional, informasi, dan ide, serta transaksi keuangan.

Setelah negara Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak juga dilaksanakan. Alasannya adalah sebagai sebuah negara baru, pemerintah pusat dituntut untuk mengutamakan konsolidasi kekuasaan secara terpusat sehingga keperluan untuk menjamin keragaman antardaerah dikesampingkan. Kebutuhan ke arah sentralisasi tentu saja saling bertolak belakang dengan tuntutan arah desentralisasi.

Selain itu otonomi daerah yang diselenggarakan Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya, yaitu :

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara beragam;
2. Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara-cara penyelenggaraan sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat berbagai pulau tersebut;
3. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara
4. Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokratis tersebut

5. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas . dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efisiensi dan efektivitas tersebut akan tercapai.<sup>10</sup>

## **B. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm.30

atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai

“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

#### 1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.



## 2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

## 3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini

berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

1. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2015

## **C. Tinjauan Umum Keuangan Daerah**

### **1. Keuangan Daerah**

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Halim (2001:19) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

## **2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2001:20) ruang lingkup keuangan daerah ada dua yaitu :

a. Keuangan Daerah yang dikelola langsung, meliputi :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
2. Barang-barang inventaris milik daerah

b. Kekayaan Daerah yang dipisahkan, meliputi :

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan dikehendaki daerah tersebut.<sup>12</sup>

## **3. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan keuangan daerah yang dipisahkan. APBD dan barang/kekayaan milik daerah merupakan salah satu contoh keuangan daerah yang dipisahkan.

Keuangan daerah dikelola dengan menggunakan manajemen keuangan daerah dengan suatu alat untuk melaksanakannya yang disebut

---

<sup>12</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28217/4/Chapter%20II.pdf>, dikutip pada tanggal 10 November 2015

dengan tata usaha daerah. Tata usaha daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha umum terkait dengan urusan surat menyurat dan administrasi lainnya, sedangkan tata usaha keuangan terkait dengan tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, dan prosedur tertentu sehingga menghasilkan informasi yang aktual dengan istilah akuntansi keuangan daerah atau lebih tepatnya merupakan salah satu bagian dalam akuntansi keuangan daerah.<sup>13</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah**

##### **1. Pengertian Perusahaan Daerah**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah “ badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.”

---

<sup>13</sup>Pramono Hariadi | YANUAR. E. RESTIANTO | ICUK RANGGA BAWONO. Pengelolaan Keuangan Daerah, hlm.4-5

Menurut Elita Dewi mengenai Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat:
  - a. Memberi jasa
  - b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum
  - c. Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menurut masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana titik beratnya kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa "Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang".

Ini berarti bahwa masih ada kemungkinan mengikutsertakan peran swasta kedalam perusahaan, dan ini sesuai dengan dasar-dasar pemikiran bahwa segala modal yang ada dalam masyarakat merupakan

---

<sup>14</sup>Elita Dewi, 2002, Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Usu Library, Medan. Hlm. 4.

pengawahan potensi dana dan tenaga (*Funds and Forces*) dapat diikutsertakan.

Ciri-ciri perusahaan daerah menurut Muh.Bakat,dkk adalah :<sup>15</sup>

1. didirikan dengan suatu peraturan daerah.
2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah.
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.

## **2. Bentuk hukum dan pendirian perusahaan daerah**

### **a. Bentuk Hukum Perusahaan Daerah**

Keberadaan perusahaan daerah di Indonesia sudah cukup lama. Hal ini terlihat, jika kita meninjau pertumbuhan Perusahaan daerah di Indonesia pada zaman Ned-Indie, telah dikenal dalam wujud *Provinciale bedriif, Gemeentebedriff*, yang pada umumnya diatur menurut ketentuan IGW dan IBW, dan setelah Indonesia merdeka perusahaan-perusahaan tersebut diteruskan, yang kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maka semua perusahaan daerah disesuaikan dengan undang-undang tersebut.<sup>16</sup>

Bentuk hukum perusahaan daerah adalah badan hukum publik dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan diberlakukannya

---

<sup>15</sup> Muh Bakat, 1989. *Ekonomi Koperasi* Edisi 2. PT. Intan Pariwara, Jakarta. Hlm. 104.

<sup>16</sup> M. Natzir Said, 1985, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia Ditinjau dan Segi Hukum Perusahaan*, Alumnus, Bandung. Hlm. 270.

peraturan daerah mengatur pendirian perusahaan daerah yang bersangkutan. Peraturan pendirian perusahaan daerah haruslah mengatur tentang pimpinan cara menguasai dan mengurus perusahaan, pertanggungjawaban oleh direksi, pengawasannya, permodalan, serta hak-hak dan kewajiban pemegang saham, dengan ketentuan tidak boleh menyimpang dan ketentuan Undang-undang Perusahaan Daerah, serta ketentuan KUH Dagang.

Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk perusahaan daerah dapat dibedakan menurut permodalannya yaitu masing-masing: perusahaan daerah yang seluruh permodalannya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham-saham. Bentuk perusahaan daerah yang demikian ini lebih sesuai memilih bentuk perusahaan umum daerah, lebih-lebih apabila sifat lapangan usahanya bersifat campuran, yaitu di satu pihak-pihak berusaha mendapatkan laba sebesar-besarnya (*commercial Corporation*), sedangkan di lain pihak memberikan layanan kepada masyarakat (*social service corporation*).

Perusahaan daerah yang modalnya terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan, terbagi atas saham-saham. Bentuk perusahaan ini sebaiknya memilih bentuk perusahaan perseroan atau koperasi terbatas lebih-lebih bagi perusahaan yang bersifat komersial (*commercial corporation*).

Dengan demikian bentuk perusahaan daerah akan merupakan badan hukum publik (yang ada dalam keadaan statis perusahaan diberlakukan



hukum publik) disatu pihak dimana perusahaan didirikan dengan peraturan daerah atau dalam perbuatan dan perhubungan hukum intern perusahaan, dilain pihak akan menemukan perusahaan daerah yang berbentuk badan hukum privat )yang dalam keadaan statis perusahaan diberlakukan hukum privat).<sup>17</sup>

Perusahaan daerah bentuk Perum teentunya masih diatur dan tunduk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dimana perusahaan daerah didirikan dengan peraturandaerah, sedangkan perseroan Terbatas yang berbentuk perusahaan daerah tunduk sepenuhnya memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

#### **b. Pendirian Perusahaan Daerah**

Landasan bagi pendirian perusahaan daerah ssampai saat masih tetap bertumpu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tebtang perusahaan daerah. Sekalipun Undang-undang tersebut telah dicabut melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 pencabutan baru berlaku efektif setelah Undang-undang penggantinya dikeluarkan, dan hingga saat sekarag.., undang-undang dimaksudkan belum dikeluarkan/belum ada. Oleh karena itu Undang-

---

<sup>17</sup>Ibid.Hlm.287-289.

undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih tetap berlaku.<sup>18</sup>

Dasar Pertimbangan Perusahaan Daerah menurut Devas antara lain :<sup>19</sup>

- 1) Menjalankan ideologi yang dianutnya
- 2) Bahwa semua produksi adalah milik masyarakat, untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli antara lain seperti angkutan umum dan telepon.
- 3) Dalam rangka mengambil alih perusahaan asing.
- 4) Untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.
- 5) Dianggap sebagai cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat dan atau menembus biaya serta untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu pendirian perusahaan daerah menyangkut kepentingan yang lebih luas, yaitu dalam hubungannya dengan pembangunan daerah yang sifatnya komplementer terhadap pembangunan nasional maka sesuai dengan sistem desentralisasi berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 1 huruf d ditegaskan bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang pendirian perusahaan daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dan instansi dan instansi atasan.

Landasan pemikiran sehingga harus mendapatkan pengesahan dari instansi atasan guna, melakukan pengawasan preventif, dapat diusahakan bahwa segala kegiatan dan perusahaan daerah disesuaikan dengan politik ekonomi daerah dan dapat dicegah dilakukannya oleh

---

<sup>18</sup>Josef Kaho Riwu.2005.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah),PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.Hlm.187.

<sup>19</sup>Nick Devas,dkk.1989.Kuangan Pemerintaah Daerah di Indonesia.Universits Indonesia,Jakarta.Hlm.75

daerah usaha yang telah termasuk dalam bidang usaha yang telah diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari konkurensi antara usaha-usaha pemerintah sendiri, dan oleh karena itu perusahaan negara dan daerah dapat diikutsertakan dimana perusahaan negara tertentu diserahkan kepada daerah atau sebaliknya daerah diikutsertakan dalam perusahaan negara tertentu.

Yang perlu mendapat perhatian tentang pendirian perusahaan daerah adalah dalam hubungannya Pasal 33 UUD 1945, dimana ditegaskan bahwa :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-undang berdasarkan peraturan daerah yang membentuknya

## **E. Retribusi Daerah**

### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi menurut Rochmad Sumitro bahwa :  
"Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara".<sup>20</sup>

Sedangkan menurut S. Munawir bahwa retribusi yaitu:<sup>21</sup>

Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan bahwa pengertian Retribusi yaitu:<sup>22</sup>

Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Jadi retribusi daerah yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>20</sup>Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 205.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup>Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 5.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, bahwa adapun ciri-ciri dari retribusi pada umumnya adalah:<sup>23</sup>

1. Retribusi dipungut oleh negara;
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu:<sup>24</sup>

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>23</sup> Victor M. Situmorang, *Op. cit.* hlm. 205.

<sup>24</sup> Marihot P. Siahaan, *Op. cit.* hlm. 7

Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Pengertian retribusi daerah menurut Panitia Nasrun adalah:<sup>25</sup>

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam Undang-Undang tersebut diatur pula mengenai pengertian retribusi daerah, yaitu :

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **1.1 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi**

Pemungutan Retribusi di Indonesia khususnya kota makassar didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan retribusi dewasa ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha

---

<sup>25</sup> Victor M. Situmorang, *Op. cit.* hlm. 206.

## 1.2 Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi daerah menurut UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2009 dan Peraturan daerah walikota nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Di dalam pasal 2 dalam peraturan daerah tersebut jenis-jenis retribusi usaha yang dimaksudkan ialah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi tempat pelelangan
- c. Retribusi tentang penginapan
- d. Retribusi tempat penyeberangan air
- e. Retribusi pasar grosir
- f. Retribusi rumah potong hewan
- g. Retribusi pelayanan kepelabuhan
- h. Retribusi terminal
- i. Retribusi tempat khusus parkir
- j. Retribusi rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penjualan produksi penjualan usaha daerah.<sup>26</sup>

Adapun kriteria retribusi jasa usaha ialah :

- 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13)

- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi bukan mamadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

### **1.3 Objek,Subjek dan Wajib Retribusi**

Dalam hal ini, dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daera,dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah. Sebagaimana yang termuat dalam pasal (4)

- (1) objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah ;
- (2) tldak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Dalam pasal (5) menyatakan subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah. Sedangkan wajib retribusi dalam pasal (6) menyatakan wajib retribusi ialah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah,termasuk pemungut atau pemotong retribusi kekayaan daerah.<sup>27</sup>

### **1.4 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

---

<sup>27</sup> Ibid



Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak itulah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.<sup>28</sup>

#### **1.4.1 Pemungutan Retribusi**

Tata cara pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha dalam pasal 32 menyebutkan ;

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, ataupun langganan.
- (3) Penagihan retribusi terutama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.<sup>29</sup>

### **F. Retribusi Parkir**

#### **1. Pengertian Retribusi Parkir**

Retribusi Parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa usaha umum yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Retribusi Jasa Usaha* (LEMBARAN Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13)

<sup>29</sup> Ibid

pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

## **2. Pengertian Parkir**

Perparkiran adalah bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, disebutkan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Tidak resmi atau ilegal adalah tidak menurut hukum atau tidak sesuai aturan. Jadi parkir tidak resmi adalah parkir tidak yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam

pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir. Pemakai tempat parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Parkir di pinggir jalan merupakan kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Parkir biasanya dilakukan secara parkir paralel atau parkir serong, bila dinyatakan demikian dengan rambu dan marka. Parkir di pinggir jalan biasanya penting untuk kegiatan bisnis

yang ada di pinggir jalan seperti apotek, toko 24 jam, kantor kecil, atau kegiatan lainnya yang ada di pusat kota.

### **3. Pengelolaan Parkir**

Dalam pengelolaan perparkiran terdapat tiga cara parkir, berdasarkan susunan kendaraan yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong. Ini adalah konfigurasi dimana pengemudi kendaraan dapat mengakses parkir secara mandiri. Adapun mengenai ketiga cara parkir tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a) Parkir paralel**

Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

#### **b) Parkir tegak lurus**

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan

parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

c) Parkir serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya.

Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah diatur mengenai klasifikasi, pemakaian tempat parkir, serta larangan dan kewajibannya yaitu :

- 1) Pasal 6 mengenai klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan laulintas kendaraan.
- 2) Pasal 9 mengenai larangan bagi pengguna dan juru parkir :
  - a. Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
  - b. Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;
  - c. Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.
- 3) Pasal 10 mengenai kewajiban pengguna tempat parkir dan juru parkir:
  - a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
  - b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan;
  - c. Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
  - d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
  - e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

#### **4. Tarif Parkir**

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah<sup>30</sup>. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas<sup>31</sup>

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung

---

<sup>30</sup> Ahmad Yani, Op Cit., Hal 56.

<sup>31</sup> Ibid., Hal 64.

dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Adapun jenis pungutan dan tarif jasa dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 yaitu:

- (1) Jenis Pemungutan Dan tarif Parkir ditetapkan Oleh Direksi
- (2) Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan waktu tertentu
- (3) Tarif Progresif dimaksud pada ayat (2), pada pasal ini dikenakan kepada orang lain atau badan hukum
- (4) Penetapan dimaksud ayat (1) dan pasal (2) pasal ini, diberlakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas



Tarif parkir yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai berikut:

**Tabel.1**  
**Tarif Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya**

NO	Jenis Pungutan	Tarif	
		Mobil	Motor
1.	Jasa pelataran parkir insidentil tepi jalan umum dan pelataran khusus	Rp.2000	Rp.1000
2.	Jasa pelataran parkir insidentil bahari anjungan pantai losari	Rp. 2000	Rp. 1000
3.	Jasa pelataran parkir langganan bulanan	Rp. 2000	Rp. 1000
4.	Jasa parkir pelataran umum khusus angkutan komersil	Rp. 2000	-
5.	Jasa pelataran parkir tepi jalan umum wilayah pasar	Rp. 2000	Rp. 1000
6.	Jasa pelataran parkir khusus Alaska	Rp. 2000	Rp. 1000
7.	Jasa pelataran parkir wilayah panakukan mas assindo	Rp. 2000	Rp. 1000
8.	Jasa pelataran parkir tepi jalan dan pelataran umum	Rp. 1500	Rp. 1000
9.	Jasa pelataran parkir insidentil khusus rumah sakit	Rp. 2000	Rp. 1000
10.	Jasa pelataran parkir insidentil pelabuhan soekarno-hatta	Rp. 2000	Rp. 1000

Sumber: Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar Raya, 2015.

Dari data di atas jenis pungutan dan tarif jasa yang dikenakan oleh PD.Parkir kepada pengguna jasa kendaraan dikenakan tarif yang sama yaitu untuk Mobil Rp.2000 dan Motor Rp.1000. Tetapi untuk jenis pungutan Parkir tepi jalan umum hanya dikenakan tarif untuk mobil Rp.1500 dan motor Rp.1000.

#### **4.1 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Parkir**

Pemungutan Retribusi Parkir di Indonesia khususnya kota makassar didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan retribusi dewasa ini adalah Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

#### **4.2 Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Parkir**

Dalam hal ini, dengan retribusi parkir, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.

- 1) Objek retribusi parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah ;
- 2) Subjek retribusi parkir adalah para penugguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat ;
- 3) Wajib retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## **G. Pajak Parkir**

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah menjelaskan tentang subjek,objek, dan wajib pajak parkir.

Dalam pasal 63 ayat 1 yang dimaksud dengan subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan objek parkir dalam pasal 62 ayat 1 yaitu :

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2006 Dalam Memungut Retribusi Parkir” maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kota Makassar, karena dari hasil informasi yang di dapatkan dari instansi yang berwenang dan memproses tentang penerapan retribusi parkir di Kota Makassar adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Jaya yang berkedudukan di Kota Makassar sehingga dianggap tersedia data yang cukup untuk penelitian.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

- a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak dan objek yang akan diteliti.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

## 2. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, terutama yang berkaitan mekanisme pelaksanaan retribusi parkir pada umumnya, serta kendala dan alternatif penyelesaiannya.

### b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai narasumber yang menjadi sampel di penelitian ini yaitu anggota Perusahaan Daerah Parkir dan para aparat petugas parkir di lapangan

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Populasi yang penulis gunakan dalam objek penelitian ini adalah juru parkir yang ada di kota Makassar.

### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian, atau wakil populasi yang akan diteliti. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode *sampling jenuh*. Teknik sampling diberi nama ini karena di dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek di dalam populasi dianggap sama.

Penulis mengambil 14 sampel juru parkir dari 14 kecamatan yang ada di kota Makassar.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut :

1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap aparatur pemerintah daerah yang berwenang dalam hal retribusi parkir di Kota Makassar, para aparat petugas parkir di lapangan.
2. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrument pengumpulan data lainnya.

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian menghasilkan rekomendasi berupa saran yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Dalam Memungut Retribusi Parkir**

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 dalam memungut retribusi parkir, maka penulis terlebih dahulu menyebutkan lokasi atau titik parkir resmi yang telah ditetapkan oleh Direksi :

**TABEL 2**  
**Titik Parkir Di Kota Makassar**  
**Wilayah Satu**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JURU PARKIR</b>	<b>ALAMAT TUGAS</b>	<b>TEMPAT TUGAS</b>
1	BAHIRUDDIN	Jl. Nusantara	Bar Raja Mas
2	HAMZAH	Jl. Nusantara	Bar Galaksi
3	SANNE		
4	DG. UPA	Jl. Nusantara	Bar Makassar PUB
5	BASO	Jl. Nusantara	Bar Mirama
6	MUDDING DG. SEWANG		
7	EKY DWI ALFIANTO	Jl. Nusantara	Bar Nusa Dua
8	IRWAN		
9	KASIM DG. BONTO	Jl. Nusantara	Jangkar Mas
10	ABD. RAHMAT	Jl. Nusantara	Kios Ariel
11	NAHIR	Jl. Nusantara	Kios Kafe Mega
12	DG. NABA	Jl. Nusantara	Kios Leo
13	DG.SANGKALA	Jl. Nusantara	Kios Primadona



14	NIRWAN RAYU	Jl. Nusantara	Toko Aroma
15	SANGKALA DG. MAING	Jl. Nusantara	Diva
16			
17	<u>PARAWANSA</u> <u>DG. MATU</u>	Jl. Nusantara	Hotel Agus
18	HENDRA	Jl. Nusantara	Mie Hengki
19	SYAMSUL DG. GAU	Jl. Nusantara	Mabua Café
20	SAIYE	Jl. Sulawesi	ATM BCA. MALAM
21	ISMAIL	Jl. Sulawesi	Ayam Goreng Sulawesi
22	IRFAN HAMID	Jl. Sulawesi	Bank Panin
23	ICI TAHA DG.UNJUNG	Jl. Sulawesi	Cahaya Abadi
24	MADO		
25	ABD. HAYAT. DG. NANGKA	Jl. Sulawesi	Holland
26	MUH. NATSIR	Jl. Sulawesi	Kroket Sulawesi
27	ASIS RASYID		
28	LAHAKIM	Jl. Sulawesi	Notaris
29	SUWANDI	Jl. Sulawesi	Nasi Goreng
30	DG. GALLA	Jl. Sulawesi	Pangsit Mie
31	RANDI DG. SIAMA	Jl. Sulawesi	mie titi (Siang)
32	ARIFIN		
33	AZIS		
34	ZAINAL		
35	AGUSSALIM	Jl. Sulawesi	Rm. Malabar
36	SYAMSU	Jl. Sulawesi	RM. Pate'ne (mlm)
37	SITTI SAPIRAH		
38	DG.MALU		
39	BAHARUDDIN	Jl. Sulawesi	Sop Saudara
40	ASRI		
41	TAMRAN DG. NGALLE	Jl. Sulawesi	King
42	KABRI	Jl. Sulawesi	Tk. Jaya Raya
43	MUH. AMIN RAPI	Jl. Sulawesi	Toko Cahaya Baru
44	ABD KADIR	Jl. Sulawesi	Toko Kunci
45	AMIRUDDIN	Jl. Sulawesi	Toko Sama Jaya
46	ARSYAD JUMA	Jl. Sulawesi	Toko Seni Selatan

47	MANGNGASAI DG SEWANG		
48	MURSALIM		
49	SANGKALA	Jl. Sulawesi	Ayam Goreng Sulawesi
50	SALI HALEKA	Jl. Sulawesi	Mie Kering Awa'
51	SAENAL	Jl. Sulawesi	Tepi Jalan Indomaret
52	KAMARUDDIN	Jl. Sumba	Nasi Goreng

### Wilayah Dua

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS
1	A N C U SYARIFUDDIN	Jl. Slamet Riyadi	Bank Mandiri
2			
3	BASO DG. BUBA UMAR RUSLAN DG. KULLE	Jl. Slamet Riyadi	Kantor POS
4			
5			
6	FADLAN JAUHAR SYARIFUDDIN	Jl. Slamet Riyadi	TAMAN HARIMAU
7			
8	JUDDA	Jl. Slamet Riyadi	Bank BTN
9	ANWAR DG. SITABA	Jl. Slamet Riyadi	BRI
10	BAHAR DG. NGERANG	Jl. Slamet Riyadi	Samping Balaikota
11	ABD. MUIN ABDI WAHAB	Jl. Ujung Pandang	Cafe Malam
12			
13	NURANNISA	Jl. Ujung Pandang	Eclub
14	DG. TAMA	Jl. Ujung Pandang	Internet
15	HASAN RUSMADI HASAN	Jl. Ujung Pandang	Sari Laut RRI/Penjual Kelapa
16			
17	YULIANUS MANGENDE M. YUSUF	Jl. Ujung Pandang	Sari Laut (TUGU)
18			

19	SAHARUDDIN LIWA	Jl. Ujung Pandang	Haffy Fuppy
20	HASRUL	Jl. Ujung Pandang	Benteng di Jl. Wr. Supratman
21	AKIB LUKMAN DULLAH	Jl. Ujung Pandang	Depan Benteng
22			
23			
24	M. RIVAI ABD. RAHMAN	Jl. Ujung Pandang	Samping Benteng
25			
26	SYAHRIL MUH. NAWIR SYAMSUL RIDJAL	Jl. Ujung Pandang	ES Teller Ok/Top
27			
28			
29	SONNY S LONDAH NASRUDDIN		
30			
31	JUNAEDI SYAMSUL BAHRI	Jl. Ujung Pandang	Depan POPSA
32			
33		Jl. Ujung Pandang	Depan Rotterdam
34	HAERUDDIN	Jl. Balai Kota	Dpn Kantor Pajak
35	DEDHY SETIADI ADNAN NUR	Jl. Balai Kota	Telkom
36			
37	EMBA	Jl. Balai Kota	TAMAN MACAN
38	BACO TIRO	Jl. Pattimura	Ayam Goreng Sulawesi
39	ABD. RAHMAN	Jl. Pattimura	X Mie Awa'
40	UDIN ICI	Jl. Pattimura	Notaris/Pasar Baru
41	ASO. DG. RATE (ALIMUDDIN RATE)	Jl. Pattimura	Ruko 1. Penja. Sepatu
42	ZALDI/SAFRI	Jl. Pattimura	Dapur Sulawesi
43		Jl. Pattimura	Pasar Baru
44	AZWAR	Jl. Pattimura	Pasar Baru malam
45	SECURITI	Jl. Pattimura	BRI AGRO
46	M. NASIR OPA	Jl. Pasar Ikan	BANK BCA
47	NAWAL REZA		
48	BASRI		

49	RAHMAT DG. RAUF	Jl. Pasar Ikan	Toko Italya
50	BATMEN MUSTAFA	Jl. Pasar Ikan	Toko Mahkota
51	ABBAS SAUNG	Jl. Pasar Ikan	Toko Shogo
52	BURHAN DG. LEWA	Jl. Pasar Ikan	Tk Barata
53	M. DG. LEWA	Jl. Pasar Ikan	Bank Mandiri
54	HERMAN	Jl. Dg. Bora	Warkop
55	DG. TAMANG	Jl. Amanagappa	Depan Kejaksaan
56	SALASA	Jl. Amanagappa	Warung Turi
57	ZAINUDDIN	Jl. Usman Djafar	Kafe Candy
58	IDRID SUAIB		
59	RAMLI ABBAS	Jl. Usman Djafar	TELKOMSEL / KAPE
60	WIRABUANA	Jl. Kajaolalido	Bakso Panjul
61	SANU	Jl. Kajaolalido	Bank BTN
62	DG. ROLA	Jl. Kajaolalido	BENTENG UTAMA
63	BASO L	Jl. Kartini	Depan Bank Mandiri
64	MUH. IDRIS	Jl. Kartini	ATM. Bank Mandiri
65	PAK. AMIR	Jl. Kartini	Rs. Kadija
66	AMIR DG. SIKKI	Jl. Mongisidi	FHOTO Cofy
67	ARDI	Jl. Mongisidi	apotik fitra
68	ILHAM	Jl. Mongisidi	Apotik Anugrah Husada
69	ANNA	Jl. Mongisidi	Nasi Goreng
70	HAMSAH DG. RURUNG	Jl. Rusa	Kios Mahkota
71	BADOLO LEO	Jl. Rusa	Kios Muda Mudi
72	ABDULLAH DG. TAMMU	Jl. Rusa	Ratu Muda
73	NASIR BETA		
74	SYUKRI	Jl. Rusa	Pallu Basa

75	HALIK DG. NGOYO	Jl. Onta Baru	Pallu Basa
76	SAHABUDDIN		shif malam
77	AZIS	Jl. Satando	Ikan Bakar
78	ABD. RAUF BARLI	Jl. Satando	Warkop Satando
79	AMIR GADDE	Jl. Tarakan	Apotik Sumber Rejeki
80	MUH. JUFRI	Jl. Tentara Pelajar	Pallu Kaloa
81	MUNIR EFENDI	Jl. Tentara Pelajar	Sahabat Motor
82	HASAN	Jl. Tentara Pelajar	Sop Saudara (pallu kaloa 1)
83	MUHLIS	Jl. Tentara Pelajar	Toko Enam BELASSAMP.TK.16
84	RUSLI	Jl. Tentara Pelajar	Wira Jaya Motor (siang)
85	SANGKALA	Jl. Tentara Pelajar	Tk 24
86	ARSYAD	Jl. Tentara Pelajar	RM. Muna
87	MUH. ABDI AMIN	Jl. Tentara Pelajar	Nasi Uduk
88	ARIFUDDIN	Jl. Tentara Pelajar	BRI PASAR BUTUNG
89	ANCA	Jl. Tentara Pelajar	BANK PANIN
90	DG. NGALLE	Jl. Tentara Pelajar	Sebelum PIP
91	RONNY	Jl. Tentara Pelajar	MANDIRI MOTOR
92	ASRI	Jl. Tentara Pelajar	BAGAN SARIBAKERY
93	CHAERUDDIN	Jl. Yos Sudarso	Apotik Gelora Farma
94	MUHTAR	Jl. Yos Sudarso	Apotik Sofia
95	WIJIONO	Jl. Yos Sudarso	Bakso Yosda
96	MUH. ARIF	Jl. Yos sudarso	BRI
97	IRHAM. H	Jl. Yos Sudarso	Coto Yos sudarso

98	ILHAM	Jl. Yos Sudarso	PASAR CAKALANG
99	AKBAR	Jl. Yos Sudarso	Sari Laut
100	ARIEF BOHARI	Jl. Yos Sudarso	Apotik Cahaya Farma
101	ALIMUDDIN UMAR	Jl. Yos sudarso	Bank Mandiri
102	NURKHOLIS	JL.YOS SUDARSO	IKAN BAKAR
103	RESKIANDI	JL.YOS SUDARSO	KOPI RONK

*Sumber : Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya*

Pemungutan retribusi parkir di kota Makassar adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Syafrullah selaku Direktur Operasional Perusahaan Daerah Parkir tentang kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, beliau juga menegaskan :<sup>32</sup>

“Kontribusi retribusi parkir kepada PAD sebesar 56 %, kontribusi tersebut diambil dari laba perusahaan, ditambah lagi dengan adanya pajak parkir komersial yang kami stor ke Dinas Pendapatan Asli Daerah. “

Pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan penting dalam meningkatkan PAD. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki.

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara Tanggal 10 Januari 2016

Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan PAD secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap realisasi pendapatan.

Adapun target dan realisasi yang dicapai PD.Parkir Makassar Raya dalam memungut retribusi parkir di setiap wilayah yang ada di Makassar :

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2015**

NO	NAMA KECAMATAN	TEPI JALAN UMUM	PARKIR LANGGANAN BULANAN	JUMLAH
1	UJUNG PANDANG	145,187,143	26,945,500	172,132,643
2	MAKASSAR	33,600,000	12,905,000	46,505,000
3	RAPPOCINI	30,687,857	24,285,000	54,972,857
4	WAJO	119,712,857	26,062,500	145,775,357
5	BONTOALA	31,992,857	12,319,000	44,311,857
6	TALLO	1,752,857	4,970,000	6,722,857
7	UJUNG TANA	2,880,000	655,000	3,535,000
8	BIRINGKANAYA	2,961,429	18,989,000	21,950,429
9	TAMALANREA	17,172,857	160,000	17,332,857
10	PANAKUKANG	179,914,286	37,178,000	217,092,286
11	MANGGALA	1,628,571	770,000	2,398,571
12	MARISO	49,234,286	21,160,000	70,394,286
13	MAMAJANG	23,040,000	12,174,000	35,214,000
14	TAMALATE	9,192,857	6,805,000	15,997,857
		648,957,857	205,378,000	854,335,857
JUMLAH		151,042,143	94,622,000	245,664,143

*Sumber: PD.Parkir Makassar Raya*

Dari jumlah di atas, penulis menyimpulkan target dan realisasi dalam memungut retribusi parkir sangat besar yakni Rp.245.664.143. diharapkan PD.Parkir memperhatikan analisis realisasi anggaran tahun lalu dengan menambah presentase yang akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat Rancangan APBD dimana didalamnya terdapat target penerimaan yang rasional untuk dicapai dalam tahun berikutnya. Untuk itu target penerimaan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota untuk dilakukan pemungutan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir diperlukan sumber daya manusia yang lebih dalam hal pemungutan retribusi. Saat ini terdapat 892 titik parkir resmi di kota Makassar. Kualitas pegawai/kolektor dalam melakukan tugasnya seyogyanya harus menguasai apa yang dia kerjakan agar tujuan pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan baik.

Selain memungut retribusi parkir, juru parkir juga berwenang untuk menjaga setiap kendaraan yang di parkir. Dalam hal ini, Pihak PD.Parkir tidak menjamin atau tidak memberikan asuransi keamanan kendaraan kepada pengguna jasa parkir. Kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan pengguna kendaraan diberatkan kepada juru parkir yang bertugas di daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Syafrullah selaku Direktur Operasional tentang apakah pelaksanaan retribusi telah sesuai



dengan Peraturan daerah yang berlaku ? maka beliau mengemukakan pendapatnya :<sup>33</sup>

“Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didasari setiap lokasi atau tempat parkir ditentukan target retribusi. Selanjutnya pegawai kami (kolektor) diberikan kewenangan dalam memungut retribusi parkir ke jukir dan langsung diserahkan ke Perusahaan Daerah setiap harinya.”

Selanjutnya beliau menambahkan :

“setiap pendapatan yang diterima oleh juru parkir tidak semuanya masuk ke kas Perusahaan Daerah. Para juru parkir hanya menyeter 40% dari hasil pendapatan mereka, dan 60% masuk ke kas juru parkir. Pendapatan yang lebih banyak ke juru parkir karena mereka yang langsung turun ke lapangan.”

Sejalan dengan pendapat di atas penulis melakukan observasi dengan Bapak Masse selaku juru parkir di Kecamatan Panakukang beliau menambahkan :<sup>34</sup>

“pendapatan parkir yang diperoleh tidak menetap namun rata-rata penghasilan yang diperoleh paling sedikit Rp.50.000 paling banyak Rp.200.000 perhari. Pendapatan ini langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah khususnya PD.Parkir sebagai yang mengelola perparkiran di Makassar namun pendapatan tersebut tidak di serahkan seluruhnya, bapak Masse mengambil 60% dan 40 % diserahkan ke perusahaan.”

Penulis juga melakukan konfirmasi ke beberapa juru parkir di setiap wilayah kota Makassar apakah pelaksanaan pemungutan retribusi telah sesuai dengan peraturan daerah berlaku atau tidak ? Bapak Nawir

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara 5 Januari 2016

<sup>34</sup> Ibid

yang bertugas sebagai juru parkir di wilayah Veteran Selatan kecamatan mamajang di Rezeki Motor, adapun beliau mengemukakan bahwa:<sup>35</sup>

“Selama 15 tahun telah berprofesi sebagai juru parkir, terkait mengenai pelaksanaan retribusi parkir di kota Makassar memang belum optimal karena sudah menyeter tiap hari dari target yang ditentukan oleh pihak PD. Parkir sebesar Rp. 15.000 setiap harinya. Hal serupa juga berlaku pada wilayah parkir lainnya, namun terkait mengenai jumlah setoran ditentukan berdasarkan tingkat keramaian.

Beliau juga menambahkan :

Kerusakan atau kehilangan kendaraan itu bukan tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir, tetapi menjadi kewajiban saya (juru parkir) karena kami yang diberikan kewenangan untuk menjaga keamanan kendaraan.

Dalam pandangan penulis, tingkat setoran yang disesuaikan dengan kondisi wilayah yakni tingkat keramaian sudah sangat tepat. Namun dalam pandangan penulis, jumlah setoran Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan jumlah yang tidak sesuai untuk pencapaian target retribusi parkir. Dalam pengamatan penulis pada lokasi penelitian, dimana Bapak Nawir bekerja sebagai juru parkir jumlah setoran tersebut bahkan bisa diperoleh hanya dalam hitungan jam saja. Oleh karena itu, PD. Parkir perlu melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan jumlah setoran retribusi parkir di wilayah tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Azwar selaku juru parkir pada wilayah Hertasning Kecamatan Rappocini, beliau mengemukakan bahwa:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara 6 Januari 2016

<sup>36</sup> Hasil wawancara tanggal 8 Januari 2016.

“Sudah 10 (sepuluh) tahun sebagai juru parkir pada wilayah tersebut, dimana pendapatan tiap harinya paling tinggi Rp. 100.000 dan paling sedikit Rp. 50.000. Tetapi biaya yang di tetapkan dari pihak PD. Parkir cukup tinggi sebesar Rp. 48.000 setiap harinya. Apabila pemasukan tidak mencapai target maka bapak Udin biasa meminjam uang, mencari pekerjaan lain untuk membayar target setiap harinya atau meminta keringanan dari Kolektor PD. Parkir.”

Pada kesempatan lainnya, penulis melakukan wawancara dengan bapak Syarifuddin Kecamatan Tallo, beliau mengemukakan bahwa :<sup>37</sup>

Dalam pandangan penulis, penetapan waktu pemungutan iuran yang ditentukan PD. Parkir kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya, jumlah target yang dicapai juru parkir sangat beragam. Ada kalanya mereka dapat memenuhi target yang ditentukan, namun terkadang juga tidak memenuhi target yang ditentukan. Oleh karena itu, ada baiknya waktu pemungutan retribusi tidak dilakukan setiap hari, melainkan dengan jangka waktu yang lebih lama, misalnya per minggu atau per bulan. Hal ini dimaksudkan agar, para juru parkir dapat melakukan management keuangan mereka dengan baik. Jadi meskipun mereka pada hari tertentu tidak dapat memenuhi jumlah target setoran, mereka dapat menutupinya pada hari yang lain.

Pada kesempatan lainnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yusrisal selaku Juru Parkir pada Jalan Sapuli, kecamatan Wajo, beliau mengemukakan bahwa:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Hasil wawancara tanggal 9 januari 2016.

“Yusrisal yang bekerja selama 15 tahun sebagai juru parkir di Pasar Butung. Biaya parkir yang sangat mahal dan menjadi sorotan masyarakat untuk mobil Rp. 10.000 dan motor Rp. 5.000. Alasan Yusrisal menetapkan biaya parkir diluar peraturan PD. Parkir karena lamanya para pedagang atau pengunjung yang memarkirkan kendaraannya dalam waktu yang cukup lama, sehingga para juru parkir hanya mendapatkan sedikit pendapatan dan juga dari harus membagikan hasil dari biaya parkir tersebut ke teman-temannya dan juga harus menyeter ke kolektor PD. Parkir sebesar Rp. 25.000.”

Beliau juga menambahkan :

“proses pemungutan yang dilakukan oleh kolektor kepada juru parkir dilakukan setiap hari, sehingga kami sebagai juru parkir tidak perlu lagi datang ke PD.Parkir untuk menyeter hasil retribusi parkir”

Dalam pandangan penulis, hal tersebut lebih meringankan para juru parkir dalam proses penyeteran retribusi parkir. Kolektor yang datang untuk menagih pemungutan retribusi parkir telah ditentukan sehingga setiap pemungutan setiap harinya langsung di stor ke Perusahaan Daerah Parkir.

Kemudian di kesempatan berikutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Masse selaku juru parkir di Kecamatan Biringkanaya beliau mengemukakan bahwa:<sup>39</sup>

“setiap hari kolektor datang untuk menagish hasil retribusi parkir namun biasanya yang datang hanya datang satu orang untuk satu kawasan perparkiran di . Dan pada saat menagih saya beranggapan beberapa kolektor melakukan manipulasi jika melihat dari gerak geriknya yang melakukan tawar menawar dalam penagihan setoran tiap harinya.”

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2016

Kemudian penulis mencari data pendukung lainnya dengan mewawancarai Bapak Yance Andarias selaku juru parkir di Kecamatan Tamalanrea, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa :<sup>40</sup>

“pengumpulan setoran yang dilakukan ke PD.Parkir belum efektif. Saya curiga ada permainan yang terjadi karena sering tawar menawar dalam pemungutan retribusi dengan berbagai alasan. Target yang ditentukan dari Direksi masih bisa ditawar ke kolektor. Sehingga setoran menjadi tak menentu dan tiap hari selalu berubah.”

Sejalan dengan pendapat di atas, penulis juga mewawancarai Bapak Hendra selaku juru parkir di Kecamatan Manggala beliau mengemukakan pendapatnya bahwa :

“pemungutan retribusi parkir oleh PD.Parkir Makassar menurut saya belum efektif. Selama 10 Tahun saya bekerja sebagai juru parkir di wilayah ini tempat saya bekerja, kolektor selalu menaikkan target yang harus dicapai tanpa ada pemberitahuan resmi dari PD.Parkir.

Senada dengan diterangkan dengan Bapak Hendra maka penulis mewawancarai Bapak Rustam kecamatan Mariso. Beliau menyatakan bahwa :<sup>41</sup>

“Pemungutan yang dilakukan setiap hari oleh PD.Parkir Makassar Menurut saya belum efektif. Karna Para Kolektor menghimbau bahwa target diberikan oleh juru parkir harus tercapai setiap harinya. Tanpa melihat keramaian di wilayah saya bekerja.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa para juru parkir, maka penulis menyimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 dalam memungut retribusi parkir belum sesuai

---

<sup>40</sup>Ibid

<sup>41</sup>Hasil Wawancara 11 Januari 2016

karena dari hasil observasi lapangan yang penulis lakukan dengan pihak PD. Parkir dan juga beberapa para juru parkir di kota Makassar belum berjalan optimal dengan peraturan daerah yang berlaku, masih banyak juru parkir di kota Makassar yang diberatkan PD.Parkir dalam melakukan pemungutan retribusi. Tingginya tingkat keramaian di setiap wilayah tidak menjamin banyaknya hasil yang mereka peroleh. Selain itu dalam melakukan pemungutan retribusi parkir, Pihak PD.Parkir juga tidak menjamin keamanan kendaraan pengguna jasa parkir. Kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan pengguna kendaraan diberatkan kepada juru parkir yang bertugas di daerah tersebut. Selain itu tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif, inilah salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Kerjasama yang baik dan sistem penagihan sangat berperan penting untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam optimalisasi pemungutan retribusi parkir belum berjalan efektif , masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir sebagai salah satu alat bukti pembayaran yang sah. Pemberian karcis parkir yang tidak di optimalisasikan oleh juru parkir dan PD.Parkir Makassar inilah yang dapat membuat kebocoran anggaran. Sehingga kolektor yang memungut

retribusi parkir dapat memanipulasi anggaran dan tidak sesuai dengan target pendapatan yang ingin dicapai.

#### **B. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pengawas PD Parkir terhadap Juru Parkir Dalam Memungut Retribusi Parkir**

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan yang dapat menimbulkan parkir liar bisa diminimalisir. Sebab dalam pengelolaan parkir tepi jalan di kota makassar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampaui batas dan jika melampaui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya yang dapat berdampak kemacetan.

Pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kota Makassar dilakukan Pengawas Independen merupakan pengawasan yang ada di setiap kecamatan yang bertugas mengawasi kegiatan juru parkir. Tugas Tim Pengawas Independen PD. Parkir Makassar Raya terdiri dari:

1. Melakukan pengawasan dan pendataan potensi perparkiran di wilayah Kecamatan dalam Daerah Kota Makassar serta menyampaikan kepada juru parkir untuk tidak memarkir kendaraan di Daerah pedestrian.

2. Melakukan pendataan dan pengamatan terhadap potensi parkir inisidental dan Parkir Langganan Bulanan (PLB) yang ada di wilayah kecamatan.
3. Mengawasi dan memantau perilaku para juru parkir terutama juru parkir liar ;
4. Mengawasi juru parkir memerintahkan penggunaan atribut resmi berupa ID Card dan rompi kepada para juru parkir resmi.
5. Mengawasi juru parkir dalam penggunaan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir serta tidak meminta uang jasa parkir melebihi nilai karcis.
6. Membuat laporan setiap hari atas tugas yang telah dilaksanakan dan dilengkapi dengan bukti kegiatan

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Pengawas Independen Nomor:085/20-S.Kep.Dir/XI/2015 Nama-nama Tim Pengawas Independen PD. Parkir Makassar Raya sebagai berikut :



**Tabel 4**  
**Nama-Nama Tim Pengawas Independen PD. Parkir Makassar Raya**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS DAN WILAYAH PENGAWASAN</b>
1.	Drs. Hamzah S.	Kolektor PLB
2.	Arman Amir	Pengawas Independen Kec.Tamalanrea dan Biringkanaya
3.	Muh.Budhy Mulyawan	Pengawas Independen Kec.Panakukang
4.	Muslim	Pengawas Independen Kec.Ujung Pandang
5.	Ahmudi	Pengawas Independen Kec.Mariso dan Mamajang
6.	Andi Baso Nur	Kolektor Tepi Jalan Wilayah XVI
7.	Kahar	Pengawas Independen Kec.Wajo
8.	Amir Asis	Pengawas Independen Kec.Makassar dan Mamajang
9.	Lukman Tambose	Pengawas Independen Kec.Tallo dan Ujung Tanah
10.	Risal Bahar	Pengawas Independen Kec.Rappocini
11.	A.Asdar	Kolektor Tepi Jlan Wilayah XII
12.	Andi Akbar Makka	Pengawas Independen Kec.Panakukang
13.	H.Muh.Camsri M.Tappa	Pengawas Independen Ke.Wajo
14.	Jamaluddin	Pengawas Independen Kec.Ujung Pandang

Sumber Data : PD. Parkir Makassar Raya, 11 Januari 2016

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengawas yang ada di Kota Makassar dalam memungut retribusi parkir yaitu berjumlah 14 orang. Selain itu terdapat pengawas yang memiliki tugas mengawasi 2 wilaayah pengawasan pemungutan retribusi parkir.

Berkaitan dengan hal ini, penulis mempertanyakan terkait dengan pengawasan khusunya tentang ketersediaan SDM pengawas yang dalam

pandangan penulis sangat minim, jika dibandingkan dengan banyaknya wilayah parkir yang harus diawasi di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrullah, selaku Direktur Operasional PD.Parkir beliau mengemukakan bahwa:<sup>42</sup>

“memang pada dasarnya jumlah pengawas masih sangat minim, namun demikian dalam rangka efektifitas pengawas tidak diwajibkan untuk melakukan pengawasan tiap hari. Sehingga mereka dapat menentukan magement waktu dan wilayah pengawasan sendiri.”

Dalam pandangan penulis, hal ini sebenarnya justru tidak mewujudkan efektifitas, karena PD. Parkir Kota Makassar memiliki personil yakni Colector (juru tagih) yang justru melakukan penagihan setiap hari. Semestinya dalam rangka efektifitas pengawasan, PD. Parkir tidak lagi perlu membentuk pengawas, cukup memberikan tugas pengawasan kepada colector, karena mereka dapat melakukan pengawasan setiap hari sambil melaksanakan tugas untuk memungut retribusi.

Pengawasan penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kabag.Produksi yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi. PD.Parkir Makassar Raya.

---

<sup>42</sup>Ibid

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Syafrullah, selaku Direktur Operasional PD.Parkir Makassar Raya beliau menyatakan bahwa :<sup>43</sup>

“setiap 3 kali Tim saya turun lapangan untuk mengecek seluruh juru parkir, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua pungutan retribusi parkir sudah disetor kepada para kolektor yang bertugas”

Selain itu beliau menambahkan bahwa :

“pengawasan yang dilakukan tidak hanya mengenai pungutan retribusi parkir tetapi juga mengenai letak parkir yang tidak melewati batas yang telah ditentukan, sehingga tidak penghambat jalan kendaraan di jalan raya dan juga dilakukan pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap selesai memungut retribusi parkir. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi”

Sejalan dengan pendapat di atas penulis melakukan observasi lapangan dengan Bapak Syamsuddin Dg.Nau selaku juru parkir di Kecamatan Ujung Tanah beliau menambahkan :<sup>44</sup>

“Berbicara soal pengawasan yang dilakukan oleh pihak PD.Parkir menurut saya tidak berjalan optimal, karena tim pengawas yang seharusnya turun lapangan untuk mengecek bagaimana pelaksanaan kegiatan perparkiran, hanya menegur juru parkir apabila tidak memakai atribut parkir.”

Untuk mencari data pendukung lainnya maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Parawansah Dg. Mutu selaku juru parkir di Kecamatan Makassar beliau menjelaskan bahwa :<sup>45</sup>

“Pengawasan pemungutan rertribusi parkir oleh Perusahaan Daerah Parkir yang seharusnya setiap hari turun ke lapangan untuk mengecek situasi parkir, hanya datang 1 bulan sekali itupun

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara 12 Januari 2016

<sup>44</sup> Hasil Wawancara 13 Januari 2016

<sup>45</sup> Ibid

para pengawas tidak pernah melakukan pengecekan terhadap blok karcis parkir.”

Senada dengan pendapat diatas, penulis juga mewawancarai Bapak Nasaruddin, selaku juru parkir di Kecamatan Ujung Pandang, beliau menyatakan bahwa :<sup>46</sup>

“selama saya bekerja jadi tukang parkir di wilayah ini, saya tidak pernah melihat pengawas dari PD.Parkir datang ke wilayah saya bekerja.”

Pada kesempatan lainnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Juru Parkir di Kecamatan Ujung Pandang, beliau mengatakan bahwa :<sup>47</sup>

“Saya sudah 2 tahun bekerja jadi Juru Parkir di tempat ini, selama saya bekerja jadi juru parkir disini, saya melihat hanya 1 kali dalam seminggu para pengawas PD.Parkir datang untuk memantau itupun tanpa menanyakan situasi perparkiran setiap harinya.”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Baso Hasanuddin, selaku juru parkir di Kecamatan Bontoala, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa :<sup>48</sup>

“saya sudah 5 tahun bekerja jadi juru parkir di tempat ini, di tempat ini saya bekerja 2 orang, kebetulan saya bekerja pada waktu pagi hari sampai dengan sore hari. Selama saya disini saya melihat pengawas PD.Parkir datang 2 kali dalam sebulan untuk memantau sistem perparkiran yang ada di wilayah ini.”

Selanjutnya beliau juga menambahkan :

“Para pengawas yang datang kesini hanya menegur juru parkir yang tidak memakai atribut parkir. Seperti, rompi parkir, id card.

---

<sup>46</sup>Ibid

<sup>47</sup>Hasil Wawancara 15 Januari 2016

<sup>48</sup>Ibid

Mereka tidak pernah menanyakan prosedur penyetoran retribusi parkir yang dilakukan juru parkir kepada kolektor (juru tagih) .”

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Bapak Rahman selaku juru parkir di Kecamatan Tamalate, beliau mengatakan bahwa :<sup>49</sup>

“selama 7 tahun saya bekerja sebagai juru parkir, saya tidak pernah melihat pengawas dari PD.Parkir datang ke wilayah saya bekerja.”

Adapun pengertian pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Menurut pandangan penulis, pengawasan yang dilakukan oleh PD.Parkir Makassar Raya baik yang bersifat Langsung maupun tidak langsung belum efektif. Karena setiap pengawas yang datang yang seharusnya memantau jalannya perparkiran setiap harinya dan menanyakan bagaimana proses pemungutan retribusi yang dilakukan oleh para kolektor (juru tagih) kepada juru parkir. Tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada para juru parkir yang penulis wawancarai. Hal tersebut berarti para pengawas membuat laporan atau data yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan .

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan meningkatkan

---

<sup>49</sup>Ibid

target yang ditetapkan setiap tahun anggaran serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pengawasan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penagihan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas penagihan jasa retribusi parkir/kolektor terhadap para juru parkir kemudian di setor Kasie.Kasir dan selanjutnya disetor kepada Kabag.Kuangan PD.Parkir Makassar Raya.
2. Kabag keuangan membuat laporan penerimaan retribusi parkir dalam buku pendataan dan dicatat sebagai buku penerimaan pada buku kas umum dari hasil retribusi parkir kedalam buku pendataan dan ;
3. dicatat sebagai buki penerimaan pada buku kas umum dari hasil retribusi parkir setiap hari kemudian laporan tersebut dikelola oleh Kasie.Pendataan setelah itu diajukan kepada Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya untuk ditanda tangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan Kabag.Kuangan menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya untuk disetujui dan Badan Pengawas, setelah itu dibuatkan proposal untuk di setujui oleh Walikota sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang menanungi PD Parkir Makassar Raya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Makassar belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. masih banyak juru parkir di kota Makassar yang diberatkan oleh PD.Parkir dalam melakukan pemungutan retribusi. Tingginya target yang di tetapkan oleh PD.Parkir tidak menjamin banyaknya hasil yang mereka peroleh. Selain itu juga banyaknya kolektor yang melakukan permainan terhadap target yang telah ditentukan oleh PD.Parkir sehingga terjadinya kebocoran anggaran .inilah salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Kerjasama yang baik dan sistem penagihan sangat berperan penting untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan.
2. Pengawasan yang di lakukan PD.Parkir belum mewujudkan efektifitas, karenapengawas yang turun ke lapangan hanyabersifat berkala, dan tidak menanyakan tentang sistem perparkiran setiap harinya. Selain itu memiliki personil yakni Kolektor (juru tagih) yang justru melakukan penagihan setiap hari. Semestinya dalam rangka

efektifitas pengawasan, PD. Parkir tidak lagi perlu membentuk pengawas, cukup memberikan tugas pengawasan kepada kolektor, karena mereka dapat melakukan pengawasan setiap hari sambil melaksanakan tugas untuk memungut retribusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak PD.Parkir Makassar terus memaksimalkan potensi penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi PAD pemerintah kota Makassar.
2. Upaya dalam meningkatkan pengawasan perparkiran seyogyanya PD.Parkir turun setiap hari kelapangan untuk menindaki laporan-laporan yang masuk mengenai kegiatan perparkiran. Bukan hanya pengawasan terhadap juru parkir, tetapi juga terhadap mekanisme perparkiran di Kota Makassar.
3. Kepada Direktur Operasional PD.Parkir Makassar Raya harus memberikan asuransi keamanan kendaraan bagi setiap pengguna jasa kendaraan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dalam bidang perparkiran kota Makassar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah Syukur, 1987, Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Ujung Pandang Persadi.
- Achmad Ruslan, 2011, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Christine S.T. Kansil, 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara.
- Elita Dewi, 2002, Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Salam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Medan, Usu Library.
- Kaho, J.R, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Grafindo Persada.
- Josep Kaho Riwu, 2005, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah), Jakarta, Grafindo Persada
- Manan, Bagir, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Marihor Pahala Siahaan, 2013, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muh Bakat, 1989, Ekonomi Koperasi Edisi 2, Jakarta, PT. Intan Parawira.
- Muh. Natzir Said, 1985, Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perusahaan, Bandung, Alumni.
- Nick Devas, Dkk, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grafindo Persada
- Pramono Hariadi I Yanuar E. Restianto I Ick Rangga Bawono, 2010.
- Rozali Abdullah, 2002, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta, Grafindo Persada.

Ray Pratama Siadari, 2010, *Konsepsi Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Makassar.

Sarundajang, 2000, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pokok-PokoPemerintahan Di Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan RetribusiDaerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum

Peraturan Daerah Walikota Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**WILAYAH** : TIGA  
**NAMA KOLEKTOR** : ZAINUDDIN  
**DAFTAR TAHUN** : 2016  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	ABD. RASYID	Jl. Datuk Museng	De'de	21,000	21,000	21,000	UP
2	ADNAN ARIFIN	Jl. Datuk Museng	Mie Titi	10,000	10,000	10,000	UP
3	SOFYAN			20,000	20,000	20,000	
4	HUSAENI	Jl. Datuk Museng	RM. Lae-lae	58,000	58,000	58,000	UP
5	TRIWARDANA						
6	DARMAWAN/S. TOLA						
7	M. AMIN	Jl. Datuk Museng	RM. Padang (Kios Mahkota)	21,000	21,000	21,000	UP
8	HERMAN	Jl. Datuk Museng	Pallu Basa		tdk aktif	75,000	UP
9	ARSYAD	Jl. Datuk Museng	RM. Kayangan	10,000	tdk aktif	tdk aktif	UP
10	ZAENAL	Jl. Datuk Museng	Sop Ubi	18,000	18,000	18,000	UP
11	<u>BUNDU DG. NYAU</u>	Jl. Lamaddukelleng	Depan Ratu Gurih	17,000	17,000	17,000	UP
12	SALEH	Jl. Lamaddukelleng	New Dinar	40,000	40,000	40,000	UP
13	<u>IRWAN DG. LIMPO</u>	Jl. Lamaddukelleng	RM. Losari	25,000	15,000	15,000	UP
14	HASAN DG. GAMA	Jl. Lamaddukelleng	SMA Rajawali	20,000	20,000		UP
15	ARIADI	Jl. Lamaddukelleng	RM. Muda	-	-	-	
16	RENDRA	Jl. Lamaddukelleng	Dinar	15,000	15,000	15,000	UP
17	SONI						
18	SAHARUDDIN	Jl. Lamaddukelleng	Kios Hokki	12,000	12,000	12,000	UP
19	DG. LIWANG						
20	<u>DAHLIA DG. NGAJ</u>	Jl. Penghibur	Bakso Losari			105,000	UP
21	DG. TOLLA	Jl. Penghibur	Bakery Nita	20,000	20,000	20,000	UP
22	HIDAYATULLAH	Jl. Penghibur	BNI	32,000	-	-	UP
23	SAMODDIN	Jl. Penghibur	Dpn. RS. Stellamaris	25,000	25,000	25,000	UP
24	YOSDAR	Jl. Penghibur	HAKATA MALAM	18,000	18,000	18,000	UP
25	SAHRUN			13,000	13,000	13,000	
26	HALIJA DG. JIA	Jl. Penghibur	Ikan Bakar/Circle. K	18,000	18,000	18,000	UP
27	ANTO	Jl. Penghibur	Kios Semarang	35,000	35,000	35,000	UP
28	SANDI						
29	BAHARUDDIN	Jl. Penghibur	Kios Sentosa	48,000	48,000	48,000	UP
30	HAMSAH			30,000	30,000	30,000	
31	NURDIN	Jl. Penghibur	Losari Beach	29,000	29,000	29,000	UP
32	USMAN	Jl. Penghibur	Pantai Indah	20,000	20,000	20,000	UP
33				11,000	11,000	11,000	
34	MUHTAR R. SIATAN	Jl. Penghibur	Kareba	15,000	15,000	15,000	UP
35	<u>SULAIMAN DG. NYA'LA</u>	Jl. Penghibur	KFC	40,000	40,000	40,000	UP
36	DG. NASSA						
37	M. BASIR YUSUF						
38	ANWAR						
39	HARTATI	Jl. Penghibur	Kios Semarang Pagi	17,000	17,000	17,000	UP

40	NASIR DG. RANI	Jl. Penghibur	MGH	15,000	15,000	15,000	UP
41	AMIR	Jl. Penghibur	The Level	10,000	10,000	10,000	UP
42	PALDI	Jl. Penghibur	Es. Teler 77	10,000	10,000	10,000	UP
43	DG. SERANG						
44	BANGSALA	Jl. Ranggong	COTO RANGGONG	25,000	25,000	25,000	UP
45	MANSYUR HUSEN	Jl. Ranggong	Sinar Alam	20,000	20,000	20,000	UP
46	ABD. RAHMAN	Jl. Ranggong	Warung Pecal	21,000	21,000	21,000	UP
47	HUSA HERI	Jl. Ranggong	RM. Victoria/FLORIDA	15,000	15,000	15,000	UP
48	DG. GALLA						
49	AHMAD MUHAMMAD	Jl. Somba Opu	Depan Mesjid			154,000	UP
50	NAJA	Jl. Somba Opu	Nasi Goreng Bintang	5,000	5,000	5,000	UP
51	MUH.TAKBIR	Jl. Somba Opu	RM. Nyoto MLM	30,000	30,000		UP
52	RAHIM DG. TALLI		RM. Nyoto Pagi/Bubur a	30,000	30,000	30,000	
53	MELKY CHANDRA			20,000	20,000	43,000	
54	IRWAN	Jl. Somba Opu	Setia Budi	6,000	6,000	6,000	UP
55	FIRMAN	Jl. Somba Opu	Tk. Logam Tunggal	25,000	25,000	15,000	UP
56	HASAN. N	Jl. Somba Opu	Tk. Victoria	32,000	32,000	10,000	UP
57	ABD. SALAM						
58	DARIANTO	Jl. Somba Opu	Toko Aurora/MUJUR	35,000	35,000	25,000	UP
59	GURU	Jl. Somba Opu	Mas Benteng	38,000	38,000		UP
60	MUSTARI LION	Jl. Somba Opu	Toko maju/Indonesia	32,000	32,000		UP
61	UDIN			15,000	15,000	15,000	
62	SULTHANI	Jl. Somba Opu	Toko Metro	11,000	11,000		
63	SYAMSUDDIN DG. SIKKI						UP
64	BASRI	Jl. Somba Opu	Toko Mujur				UP
65	SITTI ZUHRA, SE	Jl. Somba Opu	Penjual Nasi Goreng	8,000	8,000	8,000	UP
66	TIKA	Jl. Somba Opu	Toko Senang	24,000	24,000		UP
67	SAINUDDIN						
68	DIDI SUDIRMAN	Jl. Somba Opu	remaja Jaya	32,000	32,000	10,000	UP
69	SALEH DG. TOLA						
70	HENDRA DG.BUANG	Jl. Somba Opu	Sets	10,000	10,000	-	UP
71	RAHMAT	Jl. DG Tompo	Ikan Bakar	10,000	10,000	10,000	UP
72	MARTHEN LUNGAN						
73	ABD. RAHMAN SALDHY	Jl. Bau Massepe	Soto Betawi	10,000	10,000	10,000	UP
74	EDI	Jl. Bau Massepe	RM. Lay	10,000	10,000	10,000	UP
		Jl. Bau Massepe	MIE AWA	15,000	15,000	15,000	
<b>JUMLAH</b>				<b>1,172,000</b>	<b>1,120,000</b>	<b>1,248,000</b>	

Makassar,01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**ZAINUDDIN**  
Kolektor Wil. III

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
**Direktur Operasional**

**WILAYAH** : TIGA  
**NAMA KOLEKTOR** : BASRI  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	ABD. RASYID	Jl. Datuk Museng	De'de	21,000	21,000	21,000	
2	ADNAN ARIFIN	Jl. Datuk Museng	Mie Titi			-	
3	SOFYAN			20,000	20,000	-	
7	M. AMIN	Jl. Datuk Museng	RM. Padang (Kios Mahkota)	21,000	21,000	21,000	
8	HERMAN	Jl. Datuk Museng	Pallu Basa		tdk aktif	75,000	
9	ARSYAD	Jl. Datuk Museng	RM. Kayangan	10,000	tdk aktif	tdk aktif	
10	ZAENAL	Jl. Datuk Museng	Sop Ubi	18,000	18,000	18,000	
11	BUNDU DG. NYAU	Jl. Lamaddukelleng	Depan Ratu Gurih	15,000	15,000	15,000	
13	IRWAN DG. LIMPO	Jl. Lamaddukelleng	RM. Losari	25,000	15,000	15,000	
14	HASAN DG. GAMA	Jl. Lamaddukelleng	SMA Rajawali	20,000	tdk aktif		
16	RENDRA	Jl. Lamaddukelleng	Dinar				
17	SONI			15,000	15,000	15,000	
18	SAHARUDDIN	Jl. Lamaddukelleng	Kios Hokki				
19	DG. LIWANG			10,000	10,000	10,000	
20	DAHLIA DG. NGAI	Jl. Penghibur	Bakso Losari			90,000	
21	DG. TOLLA	Jl. Penghibur	Bakery Nita	15,000	15,000	15,000	
22	HIDAYATULLAH	Jl. Penghibur	BNI	32,000	-	-	
23	SAMODDIN	Jl. Penghibur	Dpn. RS. Stellamaris	25,000	25,000	25,000	
24	YOSDAR	Jl. Penghibur	HAKATA MALAM	18,000	18,000	18,000	
	SAHRUN			13,000	13,000	13,000	
25	HALIJA DG. JIA	Jl. Penghibur	Ikan Bakar/Circle. K	15,000	15,000	15,000	
26	ANTO	Jl. Penghibur	Kios Semarang				
27	SANDI			35,000	35,000	35,000	
30	NURDIN	Jl. Penghibur	Losari Beach	29,000	29,000	29,000	
31	USMAN	Jl. Penghibur	Pantai Indah	20,000	20,000	20,000	
				10,000	10,000	10,000	
33	MUHTAR R. SIATAN	Jl. Penghibur	Kareba	13,000	13,000		
38	HARTATI	Jl. Penghibur	Kios Semarang Pagi	17,000	17,000	17,000	
39	NASIR DG. RANI	Jl. Penghibur	MGH	15,000	15,000	15,000	
40	AMIR	Jl. Penghibur	The Level	10,000	10,000	10,000	
41	PALDI	Jl. Penghibur	Es. Teler 77	10,000	10,000	10,000	
42	DG. SERANG						
43	BANGSALA	Jl. Ranggong	COTO RANGGONG	25,000	25,000	25,000	

44	MANSYUR HUSEN	Jl. Ranggong	Sinar Alam	18,000	18,000	-	
45	ABD. RAHMAN	Jl. Ranggong	Warung Pecal	21,000	21,000	21,000	
46	HUSA HERI	Jl. Ranggong	RM. Victoria	10,000	10,000	10,000	
47	DG. GALLA						
48	AHMAD MUHAMMAD	Jl. Somba Opu	Depan Mesjid			154,000	
	NAJA	Jl. Somba Opu	Nasi Goreng Bintang	5,000			
52	IRWAN	Jl. Somba Opu	Setia Budi	6,000	6,000	6,000	
53	FIRMAN	Jl. Somba Opu	Tk. Logam Tunggal	25,000	25,000		
54	HASAN. N	Jl. Somba Opu	Tk. Victoria	32,000	32,000	10,000	
55	ABD. SALAM						
56	DARIANTO	Jl. Somba Opu	Toko Aurora	10,000	10,000		
57	GURU	Jl. Somba Opu	Mas Benteng	38,000	20,000	20,000	
60	SULTHANI	Jl. Somba Opu	Toko Metro	11,000	11,000		
61	SYAMSUDDIN DG. SIKKI						
62	BASRI	Jl. Somba Opu	Toko Mujur	21,000	21,000		
63	<u>SITTI ZUHRA, SE</u>	Jl. Somba Opu	Penjual Nasi Goreng	8,000	8,000		
64	TIKA	Jl. Somba Opu	Toko Senang	24,000	24,000		
65	SAINUDDIN						
66	DIDI SUDIRMAN	Jl. Somba Opu	remaja Jaya	32,000	32,000		
67	SALEH DG. TOLA						
68	HENDRA DG.BUANG	Jl. Somba Opu	Sets	11,000	11,000	-	
69	RAHMAT	Jl. Tompo	Ikan Bakar	10,000	10,000	10,000	
70	MARTHEN LUNGAN						
71	ABD. RAHMAN SALDHY	Jl. Bau Massepe	Soto Betawi	10,000	10,000	10,000	
72	EDI	Jl. Bau Massepe	RM. Lay	7,000	7,000	7,000	
<b>JUMLAH</b>				<b>776,000</b>	<b>681,000</b>	<b>785,000</b>	

**WILAYAH** : EMPAT  
**NAMA KOLEKTOR** : SUDIRMAN  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	BASO DG. BETA	Jl. Baji Minasa	Puskesmas	6,000			
2	RAHMADI RASYID	Jl. Cendrawasih	Pangsit Cendrawasih	9,000	9,000		
	SRI BANON			3,000			
3	ERLANG	Jl. Cendrawasih	BAKSO GAGAK.SORE	26,000		26,000	
4	MUSTARI	Jl. Cendrawasih	Bakso Mutiara	28,000	28,000	28,000	
5	FELDI						
6	SAHRUL HADI	Jl. Cendrawasih	Bank BRI	27,000			
7	ASRI	Jl. Cendrawasih	Bank Mandiri/Bank Bukopin	40,000			
8	NASARUDDIN						
9	YUDA	Jl. Cendrawasih	BRI Tanjung	17,000			
10	NASRUL	Jl. Cendrawasih	Dona - Doni	14,000	14,000	7,000	
11	ABDULLAH.T			10,000	10,000	5,000	
12	ANTO SANDING	Jl. Cendrawasih	F I F	35,000	10,000		
13	NURDIN						
14	HERMAN NASSA	Jl. Cendrawasih	Kantor Pos	25,000	9,000		
15	EDWAR LASUT	Jl. Cendrawasih	Kedai Ina	8,000	8,000	8,000	
16	HAMZAH	Jl. Cendrawasih	Manorian Travel	30,000	30,000	30,000	
17	AMRAN			8,000			
18	AGUS	Jl. Cendrawasih	Travel	10,000			
19	DG. BUANG	Jl. Cendrawasih	Pecah Belah	10,000	10,000	10,000	
				10,000	10,000	10,000	
	RONNY H.CH.DIETS	Jl. Cendrawasih	Ayam goreng/lalapan	3,000	3,000	3,000	
	ILHAM	Jl. Cendrawasih	BTN	7,000			
20	BASO	Jl. Cendrawasih	RM. Sinar	18,000	18,000	18,000	
21	RABALI		TK,MAKASSAR AGUNG	18,000	18,000	18,000	
22	SANGKALA RANI DG. SERANG	Jl. Cendrawasih	Toko Cemerlang	25,000	25,000	25,000	
23	KAMAL	Jl. Cendrawasih	Toko Cibaduyut	25,000	20,000	20,000	
24	RAHMAN	Jl. Cendrawasih	Toko Hati Maya	-	-	-	
25	SESE	Jl. Cendrawasih	Toko King	17,000	17,000		
26	NURDIN DINI	Jl. Cendrawasih	Toko Senang 5000/Alfa Medika'	17,000	17,000		
27	SUDDING DG. BELLA						
28	MUH. YUSUF PARERA	Jl. Cendrawasih	Victoria	18,000	18,000		
29	BAHTIAR	Jl. Cendrawasih	Warkop Mama Rita			60,000	
30	SAHRIL	Jl. Cendrawasih	RM. Losari	14,000	14,000	14,000	
31	SYAMSUDDIN	Jl. Cendrawasih	Alfa mart Depan Stadion	tutup	tutup	tutup	
32	ABD. RAHIM	Jl. Cendrawasih	Coto Pagi			70,000	
33	HADING	Jl. Cendrawasih	ALFA MIDI	12,000	12,000	12,000	
34	H.ARIS	Jl. Cendrawasih	APOTIK CENDRAWASIH	3,000	3,000		
35	RONI/ ANTO	Jl. Cendrawasih	MIE JAWA/ RM. MAKMUR				
36	.....	Jl. Cendrawasih	RM. TOPAZ	6,000	6,000		
37	IDRIS GASSING	Jl. Cendrawasih	SOP INEM	5,000	5,000		
38	AGUS	Jl. Cendrawasih	Rajawali Kopi Tiam	7,000			
39	SUWARLAN	Jl. Cendrawasih	Stic and Shake	10,000			
40	SAINUDDIN DG NAI	JL.Cendrawasih	ALVAMIDI	10,000	10,000		



41	RAMA	JL.Cendrawasih	Cimb Niaga	10,000			
42	SYAMSUDDIN.O	JL.Cendrawasih	Bakso Unggul				
43	HAKIAT	JL.Cendrawasih	Toko Merpati	7,000	7,000	7,000	
		JL.Cendrawasih	BRI CENDRAWASIH	5,000			
44		JL.Cendrawasih	ASOKA			35,000	
		JL.Cendrawasih	WARKOP KREASI	5,000			
		JL.Cendrawasih	DEPAN SMA KATOLIK	5,000			
		JL.Cendrawasih	SARI LAUT CENDRAWASIH	5,000	5,000		
		Jl. Haji Bau	DOKTER PRAKTEK	10,000	10,000		
45		Jl.Baji Areng	SMA 3			60,000	
46	SAPIUDDIN DG. NANRING	Jl. Gagak	Coto Gagak	25,000	25,000	25,000	
47	SYARIFUDDIN			25000	25000	25000	
48	MAMING DG. EKA			28,000	28,000	28,000	
49	HAMZAH	Jl. Gagak	Coto Maros	17,000	17,000	17,000	
50	ZULKIFLI	Jl. Kakatua	Dunia belanja Murah	35,000	35,000	35,000	
51	MUH. NUR						
52	KAMARUDDIN	Jl. Kakatua	Tk.Pasar Heboh 1	15,000	15,000	15,000	
53	FIRDAUS	Jl. Kakatua	Toko Memang Murah	20,000	20,000	20,000	
54	NASARUDDIN						
55	RAHMAT HIDAYAT	Jl. Kakatua	TOSERBA MURAH/Top Mode				
56	YOSEP			45,000	45,000	45,000	
57	RIADI						
58	SOEWANDO S.						
59	UNTUNG N			50,000	50,000	50,000	
60	ROYMON						
61	ARIFIN	Jl. Kasuari	RM. Palopo	24,000	24,000	24,000	
62	ST SAADIA (BASRI. S)	Jl. Kasuari	Sari Laut	17,000	17,000	17,000	WIL VII
63	ILYAS	Jl. Balang Boddong	SMA 8			50,000	
64	NASIR	Jl. MappaodanG	Bakso Ningrat	5,000	5,000		
65	HASIN	Jl. Mappanyukki	Bakso (Samping Pegadaian)	10,000	10,000		
66	HAERUDDIN KR. NGERO	Jl. Mappanyukki	Bakso Mappanyukki	45,000	45,000	45,000	TUTUP 2X SEBULAN
67	AHMAD HAERUDDIN						
68	HAMSINA	Jl. Mappanyukki	Bubur Ayam (pagl)	46,000	46,000	46,000	
69	RAHMAN DG. NGALLE						
70	SIRAJUDDIN	Jl. Mappanyukki	Coto Mappanyukki	15,000	15,000		
71	HERMAN BASIR	Jl. Mappanyukki	Ikan Bakar	20,000	5,000		
72	ANWAR	Jl. Mappanyukki	Pallu Basa	18,000			
73	MUH. NASIR	Jl. Mappanyukki	Penjual Mie	18,000	10,000		
74	NURDIN						
75	ZULKARNAEN	Jl. Mappanyukki	SAMSAT	218,000			
76	YAHYA						
77	DG. TEPU						
78	SYAMSUDDIN						
79	TAMA						
80	MALUDDIN DG. NGOLO	Jl. Mappanyukki	Sari Laut Suhud ( MLM )	10,000	10,000	10,000	
81						15,000	
82	SANGKALA. DG. ROLA	Jl. Mappanyukki	Warkop	30,000	tutup		
83	SAMSUDDING						
84	SYAMBAS RASYID	Jl. Mappanyukki	BELAKANG WISMA KALLA	17,000			
85	MUSLIMIN	Jl. Mappanyukki	AROMA PALOPO	12,000			

86	CAHYADI	Jl. Mappanyukki	BAKSO AGUNG	12,000	12,000	-	
87	SUPRIADI	Jl. Mappanyukki	Alfa mart	7,000			
88	AMRIN	Jl. Mappanyukki	Warung Surabaya	5,000			
89	KRISOGONUS MEAN	Jl. Mappanyukki	bakso solo	10,000	10,000		
90	ELLY	Jl. Merpati	Coto Nusantara II	28,000	20,000	20,000	
91	SAFAR	Jl. Rajawali	Kios aroma Luwu	15,000	10,000		
92	RESKY RENALDY MISMAN	Jl. Rajawali	PANGSIT	15,000	15,000	15,000	
93	UDIN DG. RANI	Jl. Rajawali	Pasar Lette	8,000	8,000	8,000	
94	HENDRIK						
			BAKSO MEGA SOLO	7,000	7,000		
95	SANGKALA DG. NGANGKA	Jl. Rajawali	Penjual Coto	13,000	13,000	13,000	
96	NYAMPA	Jl. Rajawali	Toko Rajawali Jaya	15,000	15,000		
97	.....						
98	RAHMAN	Jl. Rajawali	TPI Rajawali			50,000	
99	DJAFAR ALLE			20,000	20,000	20,000	
100	RAHMAT			10,000	10,000	10,000	
101	UDIN NANRING			12,000	12,000	12,000	
102	M. HUSAIN AD			10,000	10,000	10,000	
	ABD RAHIM					70,000	
	SAENAL R DG PAEWA						
	SYAFRI SUTTE					15,000	
103	SYARIFUDDIN	Jl. Rajawali	Warung Abdullah	5,000	5,000	5,000	
<b>JUMLAH</b>				<b>1,535,000</b>	<b>960,000</b>	<b>#####</b>	

Makassar, 01 DES 2015

Dibuat Oleh

Disetujui,

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**SUDIRMAN**  
Kolektor Wil. IV

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

**WILAYAH** : LIMA  
**NAMA KOLEKTOR** : IRWAN  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KEC
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	SYAMSUDDIN	Jl. G. Latimojong	SATE MASE-MASEA	10,000	10,000	10,000	UP
2	SLAMET RIYADI	Jl. G. Latimojong	BRI	14,000			UP
3	BADARUDDING	Jl. G. Latimojong	Nav Lantimojong	40,000	40,000	40,000	UP
4	AMIRUDDIN	Jl. G. Latimojong	Scarlet	33,000	33,000	33,000	UP
5	PARURU DG. TAJA	Jl. G. Latimojong	Ayam Goreng Dinar	30,000	30,000	16,000	UP
6	JAMALUDDIN DG. GASSING	Jl. G. Latimojong	Hawa Baru	64,000	64,000	64,000	UP
7	MUSTAMIN						
8	KAHAR						
9	BASRI BACHTIAR	Jl. G. Latimojong	ATM BCA	17,000	17,000		UP
10	BUSTANUL ABDULLAH, BSC	Jl. G. Latimojong	Apotik Andikha	setoran mingguan		50,000	UP
11	HARDIMAN	Jl. G. Latimojong	Toko Halim	17,000	17,000	17,000	MKS
12	RAHMAT	Jl. G. Latimojong	Rumah Bernyanyi BEE (9 Sept 2012)	29,000	29,000	29,000	UP
13	BAHTIAR						
14	SYAMSUL SYAM	Jl. G. Latimojong	Bebek Goreng	15,000	15,000	15,000	UP
15	KURNIAWAN						
16	ARIANTO	Jl. G. Latimojong	Warkop Movida			40,000	UP
17	MARTHEN	Jl. G. Latimojong	Rumah Bernyanyi	20,000	20,000	20,000	UP
18	RAMLI	Jl. G. Latimojong	MASTER FLEC				
19	MASSIRI	Jl. Bulu Kunyi	Toko Dunia Ilmu	18,000	18,000	8,000	MKS
20	ARFANDI			18,000	18,000	18,000	
21	YUSUF ATENG	Jl. Bulu Kunyi	Toko Bina Ilmu	40,000	40,000	40,000	MKS
22	HAMSAH DG. SITUJU						
23	HENDRA	Jl. Bulu Kunyi	Samping Osaka	29,000	29,000	15,000	MKS
24	ANTO	Jl. Bulu Kunyi	Toko Osaka	60,000	60,000	60,000	MKS
25	SANDI YUDHA RAMADHAN						
26	KAMALUDDIN DG. TINGGI						
27	GUNTUR	Jl. Bulu kunyi	Mie Titi	10,000	10,000	10,000	MKS
28	HAMKA			15,000	15,000	15,000	
29	SUHARTONO	Jl. Bulukunyi	Sari Laut Mbak Anggi	12,000	12,000	12,000	MKS
30	ACO	Jl. Bulukunyi	Sop Lidah	20,000	20,000	18,000	MKS
31	M. SYAMSIR	Jl. Bulukunyi	Sari Laut Mbak Amel	30,000	30,000	30,000	MKS
32	AMRI						
33	PITER SAKKE	Jl. Bulukunyi	Ayam Goreng Dolar	15,000	15,000	15,000	MKS
34	MANDALA	Jl. Sungai Saddang	Lulur Mandi	20,000	20,000	20,000	MKS
35	SAPUDDIN	Jl. Sungai Saddang	Toko Harapan Indah	23,000	23,000	23,000	MKS

36	M. REWA DG. LURANG			20,000	20,000	20,000	
37	ULLANG	Jl. Sungai Saddang	BRI	20,000			MKS
38	MOH. TEGUH WAHAB	Jl. Batu Putih	COTO MAROS MALAM	12,000	12,000	12,000	MKS
39	HUSAIN LASANGI	Jl. Batu Putih	Sop Batu Putih	20,000	20,000		MKS
40	ADAM	Jl. Batu Putih	Warung Ikan Bakar	20,000	20,000		MKS
41	<b>SYARIFUDDIN</b>	Jl. Gunung Nona	Yam Mie	43,000	43,000	43,000	UP
42	<b>ABD. AZIZ</b>	Jl. Gunung Nona	Atiraja	setoran mingguan	#####		UP
43	ERWIN Y	Jl. Gunung Nona	ES PUTAR PAPA BOA	30,000	30,000		UP
44	HERDI. T						
45	IRSAN	Jl. G. Merapi	MAHAJAYA	15,000	15,000		UP
46	SAKIRMAN	Jl. G. Merapi	Bakso Total (Malam)	26,000	26,000	15,000	UP
47	AGUS SALIM		(Siang)	26,000	26,000	26,000	
48	MUSTARI						
49	ASWAR	Jl. G. Merapi	Kios Ati Raja	35,000	35,000	35,000	UP
50	MANSYUR DG. NUJU	Jl. G. Merapi	Roti Olympic	30,000	30,000	30,000	UP
51	M. SAHID						
52	ABD. RAZAK	Jl. G. Merapi	Sumber Cahaya	15,000	15,000		UP
53	YENNI LAYATA	Jl. G. Merapi	T. Sinar Merapi	18,000	18,000	10,000	UP
54	RUSLAN			13,000	13,000		
55	BURHANUDDIN	Jl. G. Merapi	Tk. Damai	22,000	22,000	10,000	UP
56	SAFAR	Jl. G. Merapi	Toko Merapi Jaya	53,000	53,000		UP
57	RUSDI RAHMAN						
58	HASAN DG. NOMPO	Jl. G. Merapi	Toko Mulia	41,000	41,000		UP
59	HAMBALI						
60	ALIMUDDIN	Jl. G. Merapi	ALVA MART	13,000	13,000		UP
61	JAMALUDDIN	Jl. G. Merapi	Sate Pak Rauf	13,000	13,000	10,000	UP
62	ANSAR	Jl. G. Merapi	SUMBER SINAR	18,000	18,000		UP
63	LAURA MALAU	Jl. G. Merapi	Pangsit Mie	20,000	20,000	20,000	UP
64	NURDIN						
65	LABE	Jl.G. Merapi	Bakso / nasi campur	13,000	13,000	10,000	UP
66	JUMAIN	Jl.G. Merapi	Toko Terang	setoran mingguan	70,000		UP
67	ARSON ANTONIO	Jl.G. Merapi	Gorengan	setoran mingguan	60,000		UP
68	ABD. HABIL HALIK	Jl.G. Merapi	Dinasti	10,000	10,000		UP
69	OTTO	Jl.G. Merapi	Depan Olympic	5,000	5,000		UP
70	RACHMAT	Jl.G. Merapi	Foto Lido	8,000	8,000		UP
71	HERMAN MURSALIM	Jl. G.Lompobatang	RM. Ramayana	21,000	21,000	13,000	UP
72	RAPPE DG. AMBO	Jl. G.Lompobatang	Ayam Goreng Sulawesi	43,000	43,000	43,000	UP
73	REZA	Jl. G.Lompobatang	Penjual Konro ( Mlm-Siang )	33,000	33,000		UP
74	SAPARUDDIN					33,000	
75	GASSING			33,000	33,000		
76	MALIK					33,000	
77	DANI KULLE			20,000	20,000		
78	MUHTAR RAHMAN			20,000	20,000		
79	AWANG	Jl. G.Lompobatang	Toko Diamond	24,000	24,000	24,000	UP
80	ERWIN	Jl. G.Lompobatang	SOP SAUDARA/IKN BKR	10,000	10,000		UP
81	B.KAMARUDDIN		MALAM				UP
82	JUFRI DG. RANI	Jl. G. Bawakaraeng	Cemerlan (Tamaco)	24,000	18,000		UP

83	SATTU DG. SITABA	Jl. G. Bawakaraeng	Limbunan Tours	23,000	23,000		UP
84	BUDIYONO	Jl. G. Bawakaraeng	N O K I A	40,000	40,000		UP
85	<b>TOMPO</b>	Jl. G. Bawakaraeng	Danamon	63,000			UP
86	NUR ALAM	Jl. G. Tinggi Mae	Apotik Jaya Abadi	17,000	17,000		UP
87	KAHARUDDIN			17,000	17,000		
88	ZULKIFLI	Jl. G. Tinggi Mae	Coto Tinggi Mae	28,000	28,000	18,000	UP
89	ANSAR DG. NABA	Jl. Buntu Terpedo	Toko Aswan	26,000	26,000		UP
90	RAHIM.S	Jl. Buntu Terpedo	ADI SELULER	18,000	18,000		UP
91	HASBAR	Jl. S. Larian	Bakso Kak Boy	24,000	24,000	18,000	UP
92	M. ARIFIN	Jl. Sungai Preman	Apotik Wira Farma	18,000	18,000		UP
93	HAMKA	Jl. S. Poso	Bakso Babi	5,000	5,000		UP
94	SUPARDI	JL. S. Poso	Sate Sungai Poso	20,000	20,000	20,000	UP
<b>JUMLAH</b>				<b>#####</b>	<b>1,562,000</b>	<b>#####</b>	

**Makassar,01 DES 2015**

**Disetujui,**

**Dibuat Oleh**

**DRS. MA'MUR SAID**  
**Ka. Bagian Pengelolaan**

**IRWAN ST**  
**Kolektor**

**Diketahui,**

**SYAFRULLAH, SE**  
**Direktur Operasional**

**WILAYAH** : ENAM  
**NAMA KOLEKTOR** : HAERUL  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	ALIMUDDIN TAYANG	Jl. Dr. Ratulangi	Citra Persada	27,000	27,000		MMJ
2	DASWAN	Jl. Dr. Ratulangi	Happy Pappy	26,000	26,000	26,000	MMJ
3	RUKMAL ALI	Jl. Dr. Ratulangi	BANK MANDIRI	15,000			MMJ
4	RUDDIN	Jl. Dr. Ratulangi	BCA	15,000			MMJ
5	HALIM	Jl. Ratulangi	Toko Immortal			50,000	MMJ
6	MUH. KASIM KADIR	Jl. Dr. Ratulangi	Sido Dadi (siang)	45,000	33,000	23,000	MMJ
7	ALI SANUSI		shift malam	22,000	22,000	12,000	
8	RANO	Jl. Dr. Ratulangi	Toko Ujung Pajar	5,000	5,000		MMJ
9	WAWAN	Jl. Dr. Ratulangi	Warung Pangkep	7,000			MMJ
10	ARY WOLFF	Jl. Dr. Ratulangi	Toko Agung Lama	115,000	95,000	85,000	MRISO
11	ABD. MALIK						
12	ANSAR						
13	ABD. RAUF NOMBANG						
14	BAKRI						
15	SAMPARA DG. MAKHING	Jl. Dr. Ratulangi	CAKAR				
16	BASRI						
17	ALIMUDDIN	Jl. Dr. Ratulangi	RM. PELANGI	7,000	7,000	7,000	MRISO
18	MUSLIMIN	Jl. Dr. Ratulangi	Kopi Poenam	9,000	9,000		MRISO
19	JOHANES IWAN	Jl. Dr. Ratulangi	Rabbani	TUTUP			
20	ZUL DG. TOBO	Jl. Dr. Ratulangi	RM. Pak Endut				
21	SUARDI YASIN	Jl. Landak Baru	Toko Satu Sama	250,000	250,000	100,000	MMJ
22	RIO						
23	IRWAN BAHARUDDIN						
24	NURYADIN						
25	PAGASSING DG. KULLE						
26	LAKA DG. LIANG						
27	HASENG	Jl. Onta	Apotik Berkah	20,000	20,000	10,000	MMJ
28	SARONTE	Jl. Onta Lama	Pallu Basa	50,000	50,000	50,000	MMJ
29	RIDWAN						
30	SYAMSIH DG. TACO						
31	SYAHRIL RAJAMUDDIN						
32	AMRUL	Jl. Onta Lama	Bakso Urat	TUTUP	TUTUP		
33	ABD. AZIS	Jl. Onta Baru	Mie Onta	13,000	13,000	13,000	MMJ
34	M. NATSIR	Jl. Tupai	Blk. RS. Labuang B	20,000	20,000	20,000	MMJ
35	ANWAR						
36	ABD. RAJAB						
37	DG. PA'GO	Jl. Tupai	T.K. Amalia	12,000		-	MMJ
38	LANTI/RUSLI	Jl. Serigala	Pallu Basa	40,000	40,000	40,000	MMJ

39	ANTO						
40	M.TAYANG						
41	DG. NGERANG	Jl. Mawas	Samping Mall	25,000	25,000	25,000	MMJ
42	SUHARTONO			12,000	12,000	12,000	
43	DJULMAN MAKALANG			15,000	15,000	15,000	
44	HAFLATUN			13,000	13,000	13,000	
45	HAMZAH ADAM			17,000	17,000	17,000	
46	HENDRIK			5,000	5,000	5,000	
47	RANGKA DG. NOMPO			15,000	15,000	15,000	
48	SYAMSUL M			10,000	10,000	10,000	
49	MAKMUR	Jl. Lanto Dg. Pasev	BRI	25,000			MMJ
50	AMRI	Jl. Lanto Dg. Pasev	ATIRAJA SORE/PA	20,000	20,000	25,000	MMJ
51	AHMAD			21,000	21,000		
52	DG. ADAM	Jl. Lanto Dg. Pasev	TIKA PUTRA INDO MARET	5,000	5,000	5,000	MKS
53	ARIFUDDIN	Jl. Lanto Dg. Pasev	Warung kopi	10,000			MKS
54	RAHMAT	Jl. Lanto Dg. Pasev	Rumah Bernyanyi Dragon				
		Jl. Monginsidi	Samsung Service	15,000	15,000		
55	BAKRI WINDU	Jl. Monginsidi	Toko Buku Siswa	28,000	28,000	18,000	MKS
56	M. ILHAM	Jl. Monginsidi	Apotik Bogani/Lana	27,000			MKS
57	M. ANSAR						
58	SABARIAH						
59	MURSALIM	Jl. Monginsidi	Apotik Anugrah Husada				MKS
60	M. RUSLI						
61	BOBY			30,000	30,000	39,000	
62	RUSTAM						
63	UDIN	Jl. Monginsidi	PIA	10,000			MKS
64	SYAFRUDDIN	Jl. Monginsidi	WARKOP MAMMI	15,000			MKS
65	DG. LAU	Jl. Monginsidi	Alfa mart	12,000	12,000		MKS
66	AMIR DG. SIKKI	Jl. Monginsidi	FHOTO Cofy	8,000	8,000		MKS
67	ARDI	Jl. Monginsidi	apotik fitra				MKS
68	ILHAM	Jl. Monginsidi	Apotik Anugrah Hus	12,000			MKS
69	ANNA	Jl. Monginsidi	Nasi Goreng	8,000			MKS
70	HAMSAH DG. RURUNG	Jl. Rusa	Kios Mahkota	15,000	15,000	10,000	MKS
71	BADOLO LEO	Jl. Rusa	Kios Muda Mudi	37,000	37,000		MKS
72	ABDULLAH DG. TAMMU	Jl. Rusa	Ratu Muda	8,000	8,000	8,000	MKS
73	NASIR BETA						
74	SYUKRI	Jl. Rusa	Pallu Basa	22,000	22,000	22,000	MKS
75	HALIK DG. NGOYO	Jl. Onta Baru	Pallu Basa	11,000	11,000		MMJ
JUMLAH				1,149,000	961,000	675,000	

Makassar, 01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**HAERUL**  
Kolektor

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

WILAYAH : TUJUH  
 NAMA KOLEKTOR : RAHMAT MAHYUDDIN  
 DAFTAR TAHUN : 2015  
 TAGIHAN : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET	
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU		
1	ABDULLA DG. NGEWA	Jl. A. Yani	Bank Mega	28,000			up	
2	RUSDI	Jl. A. Yani	Depan Agung Cargo	45,000	48,000	48,000		
3	WAHYU							
4	SAHARUDDIN DG. NYALING	Jl. A. Yani	Bakso Paporit/Hawa B	19,000	15,000	15,000	up	
5	ANTO DG. BONTO	Jl. A. Yani	Nasi Kuning	34,000	34,000	34,000		
6	MUSA							
7	MUH. RIDWAN	Jl. A. Yani	Samping Bank Mega	13,000	13,000	13,000		
8	SITTI FATIMAH	Jl. A. Yani	Samping Bank Permata/Halte Bus	35,000	35,000	35,000		
9	SAMPARA DG LIRA	Jl. A. Yani	TIKI	31,000	12,000			
10	MUHTAR AWIN			26,000				
11	SUDDIN	Jl. A. Yani	Toko Sarinah ( Malam ) shif siang	18,000	18,000	18,000	up	
12	MUHIDDIN			14,000	14,000	14,000		
13	KAMISEN	Jl. A. Yani	ADIDAS	23,000	23,000	23,000		
14	BAHARUDDIN	Jl. A. Yani	PLN	20,000				
15	AMIRUDDIN/ABDILLAH	Jl. A. Yani	KIMIA FARMA	26,000	26,000	26,000		
16	HENDRA	Jl. A. Yani	Bank BCA	18,000				
17	HAIRUDDIN	Jl. Bacan	Pasar Darurat	40,000	40,000	40,000		
18	TAUFIK, M							
19	....			35,000	35,000	30,000		
20	UDDIN							
21	KAMARUDDIN	Jl. Bali	Bakso Bali	25,000	25,000	25,000		
22	DG. GEA	Jl. Bali	Toko aneka Plastik	25,000	22,000			
23	SAHRIL. R	Jl. Bonerate	Warkop (Hai Hoi)	12,000	12,000			
24	TULO DARWIS	Jl. Irian	Sop Saudara	25,000	25,000	25,000		
25	HALIM MUCHTAR	Jl. Irian	DEPAN ERAFONE/SEJAHTERA	15,000	15,000	15,000		
26	SULTAN LAGU			15,000	15,000	15,000		
27	ZAINAL	Jl. Irian	JANGKRIK TEXTILE	13,000	13,000	5,000		
28	MAKKARAENG	Jl. Irian	RM. IMPERIAL KANTONGAN					
29	PENNY							
30	JAMALUDDIN	Jl. Irian	FANTASI DISC	20,000	20,000	20,000		
31	ZULFADLI							
32	ROHANI	Jl. Tentara Pela	Ikan Bakar	10,000	10,000	10,000		
33	SYARIFUDDIN	Jl. Irian	Kopi Setia	30,000	30,000			
34	SYAMSUDDIN			30,000	30,000			
35	SANGADI	Jl. Irian	Martabak Malam	25,000	25,000	25,000		
36	AHMAD	Jl. Irian	Mie Titi/Maxim					
37	RAHIM	Jl. Irian	RM. Ateng/Sop Lidah	28,000	28,000	28,000		
38	JOHASANG	Jl. Irian	RM. Ujungpandang	22,000	22,000	22,000		
39	DG. TOBO	Jl. Irian	Surya Sakti	30,000	30,000			



40	MUH. KASIM				30,000		
41	A. DG. TABA	Jl. Irian	Toko Sinar Jaya	26,000	26,000		
42	RUSTAM LEBU	Jl. Irian	Toko Sinar Mas	45,000	45,000		
43	NORMA TAMMA	Jl. Irian	Aneka Diesel	10,000	10,000		
44	ZULKIFLI	Jl. Irian	Ashahi	25,000	25,000		
45	SANGNGING	Jl. Irian	Toko Mahkota	15,000	15,000		
46	ABD. KADIR	Jl. Irian	Toko tekstil monalisa	45,000	20,000	20,000	
47	HERMAN						
48	ANWAR	Jl. Irian	SOP Saudara				
49	LIMPO	Jl. Irian	SOP SAUDARA	6,000	6,000		
50	SYARIFUDDIN	Jl. Irian	BANK MASPION	17,000	15,000	15,000	
51	ABD. HAFID	Jl. Timor	RM. BABI	15,000	15,000	15,000	
52	FIRMAN SYAH	Jl. Irian	NINETY ONE/PLATINUM	15,000	25,000	15,000	
53	MAKMUR						
54	AGUSTINA	Jl. Irian	TOKO TANJUNG	10,000	10,000	tutup	
55	ARPA JAYA/ISMAIL	Jl. Irian	Sop Palbas Samalona	20,000	17,000	17,000	
56	JAMALUDDIN	Jl. Irian	Apotik Bahagia	10,000	10,000		
57		Jl. Irian	City Cell	5,000	5,000		
58	DG. JARRE	Jl. Irian	Jameson's (Siang/Malam)	72,000	72,000	72,000	
59	JUNAEDI						
60	AGUS						
61	RAFIUDDIN DG. SIJA						
62	RAHMAN DG. SIJAYA	Jl. Jampea	Warkop	35,000	35,000	35,000	
63	MUH. ALAMSYAH	Jl. Lembe	Pansit Mie	25,000	25,000	25,000	
64	M ALI S	Jl. Lembe	Pasar Darurat	10,000	10,000	10,000	
65	ANWAR DG. SIKKI	Jl. Lombok	Air Tahu	23,000	23,000	23,000	
66	MOH. SAID ZAINUDDIN			27,000	27,000	27,000	
67	TALLASA DG. GASSING	Jl. Lombok	Mie Anto	54,000	54,000	54,000	
68	SYAMSUDDIN						
69	SIRAJUDDIN DJAFAR	Jl. Lombok	Kios Lombok	15,000	15,000	15,000	
70	ABD. RACHMAN	Jl. Nusa kamba	Textile	11,000	11,000		
71	DARLAN	Jl. Nusa kamba	Coto	18,000	18,000	10,000	
72	HARIS	Jl. Nusakambar	Dpn Pharos	30,000	30,000	30,000	
73	MUH. ILHAM RAHMAT	Jl. Nusa kamba	RM. SURYA ( MLM + ACARA )	20,000	20,000	20,000	
74	MADI	Jl. Nusa kamba	SAMPING MANDIRI ( MLM )	75,000	75,000	75,000	
75	JOHARDI	Jl. Nusa kamba	Samping MTC	25,000	25,000	25,000	
76	MUSMULIADI		Shif Malam Shif Malam	55,000	55,000	55,000	
77	SIRAJUDDIN						
78	ADI YAYA						
79	SYAMSUMARLIN						
80	RUSTAM RUDY	Jl. Nusa kamba	Belakang Haji Kalla	15,000	15,000	15,000	
81	ABD. HAMID	Jl. Nusa kamba	Toko Makasa Elektronik	10,000	10,000	10,000	
82	SABARUDDIN	Jl. Samalona	Bilyar Samalona	tutup	tutup	tutup	
83	SABAR	Jl. Sarappo	Tk. Semeru	34,000	34,000		
84	ISMAIL	Jl. Sangir	Pangsit Mie	40,000	40,000	40,000	
85	FRANSISKUS KANISIUS DE	Jl. Sangir	Apotik Farma	60,000	60,000		
86	ZAKARIAS LESSI						

87	MAS'UD		shif pagi	55,000	55,000	25,000	
88	JAMESLINARDY		shif pagi				
89	DG. SERANG	Jl. Sangir	RM. Ateng/Soto Banjar	25,000	25,000	25,000	
90	BASO DG. TAWANG						
91	MUNIR/TAWANG	Jl. Sangir	RM. ASUNG	tutup	tutup	tutup	
92	HILAL	Jl. Sangir	Bakpao Sangir	5,000	5,000	5,000	
93	DARJUDDING	Jl. Timur	RM.HONGKONG	25,000	25,000	25,000	
94				10,000	10,000	10,000	
95	HAMJAH	Jl. Timur	Wisma Timur/Kios Pangsit				
96	SYAMSUDDIN DG, NABA			15,000	15,000	5,000	
97	FANDIRO	Jl. Serui	Nasi Kuning Serui	10,000	10,000		
<b>JUMLAH</b>				<b>1,813,000</b>	<b>1,678,000</b>	<b>1,204,000</b>	

**Makassar,01 DES 2015**

**Disetujui,**

**Dibuat Oleh**

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**RAHMAT AFFANDY**  
Kolektor

**Diketahui,**

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

**WILAYAH** : DELAPAN  
**NAMA KOLEKTOR** : MUSTAMIN  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	MUSTAMIN SIKKI	Jl. Arief Rate	Apotik Anugrah	33,000	30,000		
2	M. NASIR R	Jl. Arief Rate	ATM. Mandiri	18,000	18,000		
3	SADIKIN	Jl. Arief Rate	Segar Buah	15,000	12,000	12,000	
4	SULTAN			17,000	15,000	12,000	
5	LILIAN DG. BELLA	Jl. Arief Rate	Tepi Jalan Catherinaboth	33,000	33,000	23,000	
6	MUHAMMAD AGUS	Jl. Arief Rate	Yammie			105,000	
7	SYAMSUDDIN SERANG	Jl. Arief Rate	RS. Caterina Both	18,000	18,000	18,000	
8	HERIYANTO	Jl. Arief Rate	Makassar siput	10,000	10,000	10,000	
9	DG. LIRA	Jl. Arief Rate	TOKO CITRA	10,000	10,000	10,000	
10		Jl. Arief Rate	ROTI BOY/KOPI TIAM	10,000	10,000	10,000	
11	NASRUL	Jl. Bonto Lempangan	Obonk Steek(malam)			40,000	
12	HARIANTO DG. SEWAN	Jl. Bonto Lempangan	Sukaku	TUTUP	TUTUP		
13	IDRIS	Jl. Bonto Lempangan	PELANGI	18,000	18,000	18,000	
14	SAPARUDDIN	Jl. Bonto Lempangan	RS. PERTIWI	32,000	32,000	10,000	
15	JOMAKKA	Jl. Bonto Lempangan	CUFF TIAM	8,000	8,000	7,000	
16	DG KULLE			8,000	7,000	7,000	
17	ELLO			5,000	5,000	5,000	
18	BAKRI			7,000	7,000	7,000	
19	ARDY	Jl. Bonto Lempangan	CAFÉ THE BOS	10,000	10,000	10,000	
20	MALIK	Jl. Durian		11,000	11,000	11,000	
21	JAMALUDDIN DG. SIAJA	Jl. Emmy Saelan	Ikan Bakar	20,000	20,000		
22	SAHABUDDIN DG. KULL	Jl. Emmy Saelan	Warkop Coffe Toope	25,000	20,000	15,000	
23	ZAENAL						
24	SOLIHIN	Jl. Jend Sudirman	ACC Finance	15,000	TUTUP		
25	HARDI	Jl. Jend. Sudirman	Holland	35,000	35,000	35,000	
26	Y. DG. RANCA			40,000	40,000	35,000	
27	MUSLIADI	Jl. Jend Sudirman	Bakso Salemo	20,000	20,000	20,000	
28	YUSUF	Jl. Karunrung	Toko Ende (Malam)	25,000	20,000	15,000	
29	HERMAN TATO		shif pagi	25,000	23,000	20,000	
30	AMIR	Jl. Karunrung	Apotik Lestari (Sayonara)	35,000	35,000		
31	ABD. HAMID	Jl. Karunrung	Kafe Donal	35,000	35,000	20,000	
32	HASAN BASRI						
33	YUDDIN/RISWAN	Jl. Karunrung	Toko Ende (Siang)	30,000	30,000	30,000	
34	SANGKALA						
35	ASO DG SAU	Jl. Karunrung	Golden Foto	25,000	25,000	10,000	
36	RANDI						
37	ADITYA LATIEF	Jl. Karunrung	Ende Kado	29,000	29,000	29,000	
38	SAMSUDDIN DG. RATE	Jl. Karunrung	Millenium	29,000	29,000	29,000	
39	M. JAPRI SILA	Jl. Karunrung	Super Murah	72,000	72,000	72,000	

40	RAJAMUDDIN DG. LAU						
41	BURHAN S.	Jl. Karunrung	Coto Daeng	TUTUP	TUTUP		
42	HERLINA	Jl. Lagaligo	Butik Serene Room	25,000	25,000	13,000	
43	M. ARIEF	Jl. Lagaligo	Duta Irama	25,000	25,000		
44	LENTENG DG. GASSING	Jl. Lagaligo	Ikan Bakar (mas Daeng)			105,000	
45	ANSAR						
46	SIDO	Jl. Lagaligo	RM. Pasir Putih	18,000	18,000	18,000	
47	ABD. RAJAB	Jl. Lasinrang	City One	30,000	30,000	30,000	
48	SINGARA						
49	SAMSUDDIN DG. TOLA	Jl. Lasinrang	Dunia Kartun	43,000	43,000	43,000	
50	SAIFUDDIN DG ROWA						
51	DG. LABBANG	Jl. Lasinrang	Lumpia	14,000	14,000	14,000	
52	SUARDI			30,000	30,000	30,000	
53	ABD. AZIS SALAM	Jl. Lasinrang	Toko Bandai (Siang)	30,000	30,000	30,000	
54	MUH. SYAIFUL		SHIF SORE - MALAM	15,000	15,000	15,000	
55	SYAMSUDDIN	Jl. Lasinrang	Toko Roti	10,000	10,000		
56	ABD. RAHMAN DG. LEO	Jl. Lasinrang	Toko Sama-sama	60,000	60,000		
57	AMRAN					30,000	
58	MURSIDIN	Jl. Lasinrang	WR. Kopi lasinrang	23,000	23,000	23,000	
59	SUBIATI	Jl. Sultan Hasanuddin	Ayam Goreng Sulawesi				
60	ASRUL LATIF SIKKI			50,000	50,000	30,000	
61	ABD. LATIF DG. SIKKI						
62	HASIAH	Jl. Sultan Hasanuddin		15,000	15,000	15,000	
63	SIRAJUDDIN		DEWI WISata,				
64	JUNAEDI	Jl. Sultan Hasanuddin					
65	ARIF RAMANG	Jl. Sultan Hasanuddin	Gelael (Mlm)	45,000	45,000	45,000	
66	DAHLAN			36,000	36,000	36,000	
67	SANGKALA	Jl. Sultan Hasanuddin	Kickers siang			70,000	
68	BAKRI DG. NAI		SHIF MLM	15,000	15,000	15,000	
69	EDI	Jl. Sultan Hasanuddin	PISANG GORENG	30,000	30,000	30,000	
70	MUH. HUSAEN	Jl. Sultan Hasanuddin	TOKO TIGA	5,000	5,000	5,000	
71	MUHAJJI	Jl. Sultan Hasanuddin	KIMIA FARMA	6,000	6,000		
72		Jl. Sultan Hasanuddin	Smpng Kimia Farma	6,000	6,000	6,000	
73	ABD. RAJAB DG,KAWAN	Jl. Y. Latumahina					
74	SUPRIADI		Kios 88	41,000	41,000	41,000	
75	PUDDING	Jl. Y. Latumahina	RM. Bahari	10,000	10,000	10,000	
76	AGUS	Jl. Y. Latumahina					
77	M.DG NOMBANG		RS. HIKMA	50,000	40,000	35,000	
78	SAPARUDDIN	Jl. Khairil Anwar	RM. Cobe-cobe	32,000	32,000	32,000	
79		Jl. Dr Sutomo	SD MANGKURA			50,000	
80	ADDA	Jl. Dr Sutomo	Rombongan	10,000	10,000		
81	GERMANSUL			20,000	20,000	20,000	
82	DG RANI	JL. S.SADDANG	PENJUAL DURIAN	10,000	10,000	10,000	
JUMLAH				1,427,000	1,381,000	#####	

**Makassar, 01 DES 2015**

**Dibuat Oleh**

**Disetujui,**

**DRS. MA'MUR SAID**  
**Ka. Bagian Pengelolaan**

**MUSTAMIN**  
**Kolektor**

**Diketahui,**

**SYAFRULLAH, SE**  
**Direktur Operasional**

**WILAYAH : SEMBILAN**  
**NAMA KOLEKTOR : SUARDI**  
**DAFTAR TAHUN : 2015**  
**TAGIHAN : HARI SENIN S/D MINGGU**

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	SANDI	Jl. Andalas	Rm. TS	20,000	####	20,000	BONTOALA
2	SAMPARA	Jl. Andalas	Daimaru	42,000	45,000	45,000	BONTOALA
3	SAHARUDDIN						
4	SANGKALA DG. YEMBA	Jl. Andalas	Faradae	36,000	36,000	15,000	BONTOALA
5	ABBAS	Jl. Andalas	K. Bambu Kuning ( sis	30,000	30,000	tutup	BONTOALA
6	ISMAIL						
7	KASAMUDDIN DG. SARRO						
8	SAHABUDDIN	Jl. Andalas	RM. Bravo	20,000	20,000	10,000	BONTOALA
9	ARDI COLLENG	Jl. Andalas	RM. Dogoyudan shift malam	52,000	52,000	52,000	BONTOALA
10	M. DG. SAJU						
11	EFAR	Jl. Andalas	Sinar Andalas	27,000	27,000		BONTOALA
12	SAMPARA (SORE)			28,000	28,000		
13	MUSLIMIN	Jl. Andalas	Sop Saudara PAGI	40,000	40,000	40,000	BONTOALA
14	SUDIRMAN						
15	MUH. SALEH		Shif malam	20,000	20,000	20,000	
16	MUSTARI		Shif malam				
17	ALI		Shif malam				
18	SAHABUDDIN	Jl. Andalas	Warung Ikan Bakar	22,000	25,000	16,000	BONTOALA
19	IBRAHIM	Jl. Andalas	BRI ANDALAS	13,000			BONTOALA
20	DG. TIRO	JL. ANDALAS	PDAM ANDALAS	-		110,000	BONTOALA
21	HAIRUDDIN	JL. ANDALAS	GEREJA ANDALAS			30,000	
22	DG. CAYA						
23	HERMAN	Jl. Bandang	Andalas Teknik	17,000	17,000		BONTOALA
24	HERMAN	Jl. Bandang	Aneka Motor	23,000	23,000		BONTOALA
25	NASIR	Jl. Bandang	AS Motor	32,000	32,000		BONTOALA
26	ANTO	Jl. Bandang	Bandang Jaya	40,000	40,000		BONTOALA
27	AMBO NAI						
28	ABD. HAKIM	Jl. Bandang	BANK NIAGA	14,000	tutup		BONTOALA
29	AMBO	Jl. Bandang	Buana Motor	22,000	23,000		BONTOALA
30	MAHMUD SAHERANG	Jl. Bandang	Intan Motor/Sate	20,000	20,000		BONTOALA
31	ARIS						
32	ALEX	Jl. Bandang	Toko Sejati	40,000	tutup		BONTOALA
33	NABU	Jl. Bandang	Trio Motor				BONTOALA
34	HASANUDDIN	Jl. Bandang	WARKOP ZAHRA	20,000	20,000	20,000	BONTOALA
35	RUSTAM	Jl. Bandang	PENJUAL SATE	22,000	22,000		BONTOALA
36	KURDI ARSYAD	Jl. Bandang	WARKOP AROMA	20,000	20,000	20,000	BONTOALA
37	ANWAR	Jl. Bandang	JAKARTA MOTOR	20,000	20,000		BONTOALA
38	ZAINUDDIN	Jl. Lamuru	Coto Lamuru	17,000	17,000	17,000	BONTOALA
39	MISENG	Jl. Lamuru	Sop Lidah	12,000	12,000	12,000	BONTOALA

40	SARIPUDDIN	Jl. Lamuru	PENJUAL BAKSO	12,000	12,000	12,000	BONTOALA
41	PATAHUDDIN	Jl. Pannampu	BRI Pannampu	23,000			TALLO
42	SAID LALLO	Jl. Tinumbu	BRI Pasar Cidu	17,000			BONTOALA
43	IWAN	Jl. Tinumbu	Kopi Dottoro	16,000	16,000	16,000	BONTOALA
44	SANGKALA SIBALI	Jl. Buru	Toko Inti	tutup	15,000		BONTOALA
45	RAHMAN	Jl. Diponegoro	RM. Apong	15,000	18,000	tutup	BONTOALA
46	FIRMAN	Jl. Ujung	Toko Makmur	30,000	40,000	tutup	BONTOALA
47	M. SUYUTI						
48	SARIF						
JUMLAH				782,000	#####	455,000	

Makassar, 01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**SUARDI**  
Kolektor

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

WILAYAH : SEPULUH  
NAMA KOLEKTOR : ANDI ASDAR  
DAFTAR TAHUN : 2015  
TAGIHAN : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	A. FIRWAN	Jl. Cakalang	Kantor Lurah/Pasar	10,000	10,000	10,000	U.TANAH
2	FANDI FERDIANSYAH	Jl. Cakalang	Pasar	10,000	10,000	10,000	U.TANAH
3	DZULKIPLI	Jl. Cakalang	RM. LEPPAKKOMAE	15,000	15,000	15,000	U.TANAH
4	ANSAR	Jl. Kalimantan	Ikan Bakar	30,000	30,000	30,000	WAJO
5	TRI WAHYUDI	Jl. Sabutung	RM. Paotere	BAYAR MINGGUAN		175,000	U.TANAH
6	YAN ALFRIS . R	Jl. Sabutung	Jln masuk lelong	7,000	7,000		U.TANAH
7	JANUARTO MARTIM			7,000	7,000		
8	BURHAN EDI			6,000	6,000		
9	RUSTAM			7,000	7,000		
10	H.NAWIR					35,000	
11	FIRMAN					105,000	
12	ABD.GAFOER GAFFAR						
13	ABD. RASYID	Jl. Salemo	Bakso Salemo	14,000	14,000		U.TANAH
14	SAHABUDDIN		shif malam	12,000	12,000		
15	AZIS	Jl. Satando	Ikan Bakar	11,000	11,000		WAJO
16	ABD. RAUF BARLI	Jl. Satando	Warkop Satando	11,000	11,000		WAJO
17	AMIR GADDE	Jl. Tarakan	Apotik Sumber Rejeki	10,000	10,000		WAJO

18	MUH. JUFRI	Jl. Tentara Pelajar	Pallu Kaloa	26,000	26,000		WAJO
19	MUNIR EFENDI	Jl. Tentara Pelajar	Sahabat Motor	16,000	16,000		WAJO
20	HASAN	Jl. Tentara Pelajar	Sop Saudara (pallu ka	20,000	20,000		WAJO
21	MUHLIS	Jl. Tentara Pelajar	Toko Enam BELAS	10,000	10,000		WAJO
			SAMP.TK.16	8,000	8,000		
22	RUSLI	Jl. Tentara Pelajar	Wira Jaya Motor (sian	10,000			WAJO
23	SANGKALA	Jl. Tentara Pelajar	Tk 24	10,000	10,000	10,000	WAJO
24	ARSYAD	Jl. Tentara Pelajar	RM. Muna	-	-		WAJO
25	MUH. ABDI AMIN	Jl. Tentara Pelajar	Nasi Uduk	15,000	15,000	15,000	WAJO
26	ARIFUDDIN	Jl. Tentara Pelajar	BRI PASAR BUTUNG	16,000			WAJO
27		Jl. Tentara Pelajar	BANK PANIN	15,000			WAJO
28	DG. NGALLE	Jl. Tentara Pelajar	Sebelum PIP	15,000			WAJO
29	RONNY	Jl. Tentara Pelajar	MANDIRI MOTOR	7,000	7,000		WAJO
30	ASRI	Jl. Tentara Pelajar	BAGAN SARI	10,000	10,000	10,000	WAJO
			BAKERY	7,000	7,000	5,000	
31	CHAERUDDIN	Jl. Yos Sudarso	Apotik Gelora Farma	27,000	27,000	27,000	WAJO
32	MUHTAR	Jl. Yos Sudarso	Apotik Sofia	17,000	8,000		WAJO
33	WIJIONO	Jl. Yos Sudarso	Bakso Yosda	35,000	35,000	15,000	WAJO
34	MUH. ARIF	Jl. Yos sudarso	BRI	20,000			WAJO
35	IRHAM. H	Jl. Yos Sudarso	Coto Yos sudarso	15,000	15,000	15,000	WAJO
36	ILHAM	Jl. Yos Sudarso	PASAR CAKALANG	BAYAR MINGGUAN		56,000	WAJO
37	AKBAR	Jl. Yos Sudarso	Sari Laut	10,000	10,000	10,000	WAJO
38	ARIEF BOHARI	Jl. Yos Sudarso	Apotik Cahaya Farma	10,000	10,000		WAJO
39	ALIMUDDIN	Jl. Yos sudarso	Bank Mandiri	30,000			WAJO
40	UMAR						
41	NURKHOLIS	JL.YOS SUDARSO	IKAN BAKAR	10,000	10,000	10,000	WAJO
	RESKIANDI	JL.YOS SUDARSO	KOPI RONK	5,000	5,000	5,000	
JUMLAH				514,000	#####	558,000	

Makassar,01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

DRS. MA'MUR SAID  
Ka. Bagian Pengelolaan

ANDI RAHMAN  
Kolektor

Diketahui,

444,000 #####

SYAFRULLAH, SE  
Direktur Operasional



**WILAYAH** : SEBELAS  
**NAMA KOLEKTOR** : ILHAM  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	SIMON	S.SADDANG BARU	APOTIK KUSUMA	5,000	5,000	5,000	MKS
2		S.SADDANG BARU	WAKOP	15,000	15,000	15,000	MKS
3	ABDUL KARIM	Jl. Kerung - kerung	BRI KERUNG-KERUNG	10,000			MKS
4	MUH. DARWIS	Jl. Kerung - kerung	RM. SOP SAUDARA PANG KEP	12,000	12,000	tutup	MKS
5	JUFRI SATTUANG	Jl. Kerung - kerung	Cahaya Pangkep	7,000	7,000		MKS
6	NURDIN	Jl. Kerung - kerung	Toko Anugrah Jaya	10,000	10,000		MKS
7	WAHYUDI	Jl. Kerung - kerung	TOKO JOHSON	10,000	10,000		MKS
		Jl. Veteran Selatan	TK.DUNIA POMPA	6,000	6,000		
8	ANDI EDA YULIANTI	Jl. Veteran Selatan	BRI Mangasa	20,000			MMJ
9			MIE AWA	10,000	10,000	10,000	
10	RAHMAN	Jl. Veteran Utara	INDO MURAH	100,000	100,000	100,000	MKS
11	NUR SYAMSI						
12	SYAMSUL DG. BELLA						
13	AMIRULLAH						
14	AMIN						
15	ANWAR						
16	ABD KADIR. S	Jl. Veteran Selatan	Toko Tani	20,000	20,000	tutup	MKS
17	RENCE ALEXANDER	Jl. Veteran Utara	Coto Betawi	30,000	30,000	tutup	MKS
18	ILHAM						
19		Jl. Veteran Utara	MYOUNG				
20	TALING TATA/ABDULLA	Jl. Veteran Selatan	Bank BCA	15,000			MKS
21	MURNI	Jl. Veteran Selatan	Bank. BII				MKS
22	ABD, GAFFAR	Jl. Veteran Selatan	Bank Danamon	15,000			MKS
23	ABD.RAHIM TABA	Jl. Veteran Selatan	TIKI JNE/ CIMB NIAGA	12,000			MKS
24	SARDI	Jl. Veteran Selatan	Hollan Bakeri	15,000	15,000	tutup	MKS
25	JUNAEDI	Jl. Veteran Selatan	SENTRAL BANGUNAN		tutup	-	
26	MUH. TAZWIR KARIM	Jl. Veteran Selatan	BNI Veteran Selatan	300.000/BLN			MMJ
27	JUMAKKA DG. LAWA	Jl. Veteran Selatan	Bank Mega	12,000			MMJ
28	SOFYAN ANWAR	Jl. Veteran Selatan	ATM RS Khadija				
29	Rusly						
30	DARWIS PATA						
31	SYAHRUDDIN						
32	NAWIR	Jl. Veteran Selatan	Rezeki Motor	15,000	15,000		MMJ
33	SYARIF	Jl. Veteran Selatan	ATM . Mandiri	12,000	-		MMJ
34	BAKRI DG. LIMPO						
35	JAMALUDDIN	Jl. Veteran Selatan	WARUNG BEBEK	13,000			MMJ
		Jl. Veteran Selatan	BRI MARICAYA	10,000			

			TK. SUN	10,000	10,000		
36	MUSTARI	Jl. Veteran Utara	Bank Mandiri	22,000			MKS
37	TAUFIQ TRI AFANDY	Jl. Veteran Utara	Bank Mega	20,000			MKS
38	SHARUDDIN	Jl. Veteran Utara	BCA Veteran	60,000			MKS
39	MUH. SYARIF						
40	DG. KANANG	Jl. Veteran Utara	Veteran Elektronik	32,000	27,000	25,000	MKS
41	ABD. KHAER	Jl. Veteran Utara	K. Pos L. Bangngi	17,000			MKS
42	ZAINAB	Jl. Veteran Utara	Veteran Elektronik	30,000	30,000		MKS
43	SYAHRIL	Jl. Veteran Utara	Mentari Motor	5,000	4,000		MKS
44	SYAMSUDDIN	Jl. Veteran Utara	Apotik Wijaya	15,000	15,000		MKS
		Jl. Veteran Utara	SURYA UTAMA NUSANTARA	10,000			
45	MUH. SALEH	Jl. Mesjid Raya	Golden Foto	25,000	25,000		BONTOAL/
46	MARDA						
47	ZAINUDDIN	Jl. Mesjid Raya	Sinar Warna Foto	15,000	15,000		BONTOAL/
48	HENDRA	Jl. Mesjid Raya	Penjual martabak	25,000	25,000	17,000	BONTOAL/
49	NOEL	Jl. Mesjid Raya	Bank Bukopin	7,000			BONTOAL/
50	RAMLI	Jl. Mesjid Raya	Sinar Warna Foto	11,000	7,000	-	BONTOAL/
51	JUNAEDI	Jl. Mesjid Raya	Sinar Warna Foto				
52	HAMZAH.S	Jl.PONGTIKU	Bakso Lembo	23,000	23,000	10,000	BONTOAL/
53	MUH. RAMLI.S						
54	LOTONG	JL. SUNU	Kantor Pos	15,000	-		BONTOAL/
55	ILHAM. S					-	
56	MUH. MULYATIM	Jl. G. Bawakaraeng	Orip Lame	20,000	20,000	-	MKS
57	ISMAIL					-	
58	TAJUDDIN	JL. Urip sumoharjo	Apotik Maccini Farma	10,000	10,000	-	MKS
<b>JUMLAH</b>				<b>746,000</b>	<b>466,000</b>	<b>182,000</b>	

Makassar,01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**ILHAM**  
Kolektor

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

WILAYAH : DUA BELAS  
NAMA KOLEKTOR : ANDI BASO  
DAFTAR TAHUN : 2015  
TAGIHAN : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	NASO	Jl. A.P.Pettarani	RM. PAOTERE/INDOMAR				
2	SUKARDI						
3	JUMA			20,000	20,000	20,000	TMLTE
4	AKBAR						
5	KALLANG DG. NAI						
6	SYAHRUL	Jl. St Alauddin	Rumah Kopi	15,000	15,000		TMLTE
7	TESAR MALA PUTRA						
8	DG. GASSING	Jl. St Alauddin	Bakso Juta Rasa	52,000	52,000	52,000	TMLTE
9	SAIPUL						
10	ASRIADI HAMSAH	Jl. St Alauddin	Coto Daeng Bagadang	40,000	40,000	40,000	TMLTE
11	HASANUDDIN						
12	ARIFIN			15,000	15,000	15,000	
13	LILI	Jl. St Alauddin	Toko Buku Andalusia	20,000	20,000		TMLTE
14	SYAMSUDDING	Jl. St Alauddin	New Caesar	10,000	10,000	10,000	TMLTE
15	A. ZULKIPLI.M	Jl. S. Alauddin	Catatan Sipil	15,000			RPC
16	ALI DG. LILI	Jl. St Alauddin	BRI Depan Lapas	25,000			TMLTE
17	MALAWING	Jl. St Alauddin	BRI Sultan Alauddin	18,000			TMLTE
18	DG. TIRO	Jl. St Alauddin	Bank BTN	11,000			TMLTE
	IRWAN	Jl. St Alauddin	SARI LAUT MBAK MEGA	10,000	10,000		TMLTE
19	HARIS	Jl. Pelita Raya	bakso yosda	17,000	17,000	17,000	RPC
20	MUHAMMAD ALI	Jl. Pelita Raya	PT. Mandala Multi Finance	26,000	13,000		RPC
	HASRAN	Jl. Pelita Raya	LYRYC	10,000	10,000	10,000	RPC
21	ANTO 1.	Jl. Pelita Raya	Warkop (Kopi)	23,000	23,000		RPC
22	RUDIYANTO. M	Jl. Pelita Raya	Warung Citra Solo	13,000	6,000	6,000	RPC
23	MITA	Jl. Pelita Raya	Depan Pegadaian /Dapur Palopo				RPC
24	JIMMY						
25	ZALDI	Jl. Pelita Raya	Mega Finance	10,000	10,000		RPC
26	SYAMSUDDIN	Jl. Pelita Raya	Penjual Bakso Yosda	25,000	25,000	25,000	RPC
27	MURSALIM						
28	SYAMSUDDING DG. NYIKKO	Jl. Pelita Raya	Sari Laut	18,000	18,000	18,000	RPC
29	EKA	Jl. Pelita Raya	OTO FINANCE	10,000	10,000		RPC
30	PATTA HINDI	Jl. Rappocini	BRI	18,000			RPC
31	SYARIFUDDIN	Jl. Rappocini	Toko Mitra Jaya	15,000	15,000		RPC
32	AMIR ONDO	Jl. Rappocini	Apotik Sejati Farma	15,000	15,000		RPC
33	ASRI	Jl. Rappocini	Bakso Sejati	20,000	20,000	tutup	RPC
34	HERMAN						
35	TAJUDDIN	Jl. Rappocini	RM. Nyoto	20,000	20,000		RPC
36	ABD. AZIZ	Jl. Rappocini	UD. Sabar Jaya	22,000	22,000		RPC
37	AMMIN						

38		Jl. Rappocini	RM. Amanda Rappocini	10,000	10,000	10,000	RPC
39	SYAMSUL DG. SILA	Jl. Rappocini	Indomaret	10,000	10,000		RPC
40	RUSDI	Jl. Landak Baru	Landak Lesehan	17,000	17,000	17,000	RPC
41	NASRUM			17,000	17,000	17,000	
42	IRFAN. S	Jl. Landak Baru	Bakso Solo	10,000	10,000	tutup	RPC
43	M. REZKI	Jl. Landak Baru	Kedai Kita	7,500	7,500	7,500	RPC
44	ARIS	Jl. Landak Baru	RM. Malindo	14,000	14,000	14,000	RPC
45	NASIR			13,000	13,000	13,000	
46	YALLANG	Jl. Landak Baru	CAKHAR/INDO MARET	21,000	21,000	21,000	RPC
47	HAFID	Jl. Landak Baru	INDOMARET	10,000	10,000		TMLTE
48	MAKKUSISSING	Jl. Dg. Ngeppe	Ikan Bakar	8,000	8,000		TMLTE
49	SAFARUDDIN ABU	Jl. Dg. Tata\	BNI	22,000			TMLTE
50	ABD. JAFAR	Jl. Dg. Tata\	Tepi Jalan Alva mart	10,000	10,000		TMLTE
51	SAMPARA	Jl. Dg. Tata\	Cafe Daun	10,000			TMLTE
52	ANDI RAPI	Jl. Kumala	Toko Jaya	16,000	16,000	16,000	TMLTE
53	AMBO TUO			15,000	15,000	15,000	
54	M. ARIEF DG. SIRIWA	Jl. Kumala	Toko kue Kumala	23,000	23,000	23,000	TMLTE
<b>JUMLAH</b>				<b>746,500</b>	<b>607,500</b>	<b>366,500</b>	

Makassar, 07 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**ANDI BASO**  
Kolektor

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

**WILAYAH : TIGA BELAS**  
**NAMA KOLEKTOR : LANDAU**  
**DAFTAR TAHUN : 2015**  
**TAGIHAN : HARI SENIN S/D MINGGU**

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	ABD. RAJAB DG. SIAMA	Jl. AP. Pettarani	Bakso Belakang BPN	23,000	15,000		RPC
2	ARMIN	Jl. AP. Pettarani	BRI Syariah	11,000			RPC
3	IDRIS						
4	MAUDU DG. NASSA	Jl. AP. Pettarani	COTO SUL	20,000	20,000	15,000	RPC
5	SAWALA DG. NABA	Jl. AP. Pettarani	WOM FINANCE	15,000			RPC
6	SUPRIADI	Jl. AP. Pettarani	Internet/M. Copy (Malam)	23,000	13,000		RPC
7	NURBAYA	Jl. AP. Pettarani	INDO MARET	11,000	11,000	5,000	RPC
8	MUSTAFA	Jl. AP. Pettarani	BISNIS CENTER	8,000			RPC
9	CANDRA			8,000			
10	RAHMAN	Jl. AP. Pettarani	ZOYA	7,000			RPC
11	KAMARUDDIN						
12	ADI	Jl. AP. Pettarani	BPJS	10,000	10,000		RPC
13	SAMAUN. N	Jl. Hertasning	BRI Hertasning Baru	29,000			RPC
14	DG. SILA/TE'NE	Jl. Hertasning	Coto	7,000	7,000	7,000	RPC
15	NGAWING	Jl. Hertasning	Sop Saudara	18,000	18,000		RPC
16	DG. MATONA	Jl. Hertasning	PEGADAIAN	15,000			RPC
17	ABD. WAHAB	Jl. Hertasning	Tri Second	10,000	7,000		RPC
18	NYONG WENDO	Jl. Hertasning	Bank BTN	13,000			RPC
19	ABDULLAH	Jl. Hertasning	ATM. GRESTELINA	18,000	18,000	18,000	RPC
20	GUSTI	Jl. Hertasning	LOKET	11,000	11,000		RPC
21	JUMAKKA DG. NGAWING	Jl. Hertasning	Kantor Pos	11,000	6,000		RPC
22	TAKING	Jl. Hertasning	Pallu Basa	17,000	17,000	17,000	RPC
23	SYAHRIR	Jl. Hertasning	Warkop Coppee Lovers	20,000	20,000	20,000	RPC
24	SURIATI DG. KEBO						
	SANERU	Jl. Hertasning	APOTIK GLOBAL	5,000			RPC
25	SUGIANTO	Jl. Hertasning	Apotik Bersaudara	14,000			RPC
26	ASWAR	Jl. Hertasning	RM. AYAM PENYET	32,000	32,000	32,000	RPC
27	AMIRUDDING DG. MANGKA	Jl. Hertasning	Loket PLN	10,000	10,000		RPC
28		Jl. Hertasning	Indomaret dptn Mie Titi	10,000	10,000	10,000	RPC
29	ARIEF KRISWANTO	Jl. Hertasning	MAS RESKI SARI LAUT	20,000	20,000	20,000	RPC
30	MULIATY	Jl. Hertasning	Penjual Coto	10,000	10,000	10,000	RPC
31	IPUL	Jl. Hertasning	SOP PANGKEP	8,000	8,000		RPC
32		Jl. Hertasning	SURABI BANDUNG	7,000	7,000	7,000	RPC
33		Jl. Hertasning	ROTI MAKASSAR	5,000	5,000		RPC
		Jl. Hertasning	RM. MAS DANI	35,000	35,000	35,000	
34	NURSALIM	Jl. Raya Pendidikan	Pallu Basa	17,000	17,000		RPC
35	DG. SIKKI	Jl. Raya Pendidikan	Bakso	5,000	5,000	5,000	RPC
36	AGUS	Jl. Skarda	Ktr. Lurah G.Sari (Depan Puskesmas)	16,000			RPC

37	SIDO	Jl. GORO	JNE				RPC
38	MUH. SABIR	Jl. Emmy Saelan	Bakso Komen	22,000	22,000	22,000	RPC
39		Jl. Emmy Saelan	RM PRASMANAN	8,000	8,000		RPC
40	Muh. Rijal	Jl. Talasalapang	Sari Laut Mbak Atik	12,000	12,000	12,000	RPC
41	RUAHID	Jl. Tamalate	Apotik Sejahtera	32,000	32,000		RPC
42	RANDY	Jl. Tamalate	Sari Laut	30,000	30,000	30,000	RPC
43	NOLDI	Jl. Tamalate	Indomaret	15,000	15,000	15,000	RPC
44		Jl. Tamalate	BAKSO MAS BRO	10,000	10,000		RPC
45		JL. BAU MANGGA	RM. PADANG	10,000	10,000	10,000	PNK
46	DG. JALLING	Jl. Toddopuli	Bakso	15,000	15,000	10,000	PNK
47	NAJAMUDDIN	Jl. Toddopuli	BAKSO MINGGU	20,000	20,000	20,000	PNK
<b>JUMLAH</b>				<b>673,000</b>	<b>506,000</b>	<b>320,000</b>	

**SETORAN PERMINGGU**

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET		KET
48	SAMPARA DG. KILO	Jl. Hertasning	Bubur Pagi	15,000 x 7	105,000	RPC
49	BAHRUN	Jl. Hertasning	PASAR HERTASNING	25,000 x 7	175,000	RPC
50	DG. LU'MU	Jl. S.Saddang Baru	BRI	13,000 x 5	65,000	RPC
	SIDO	Jl. GORO	JNE		78,000	
51	SYUKUR	Jl. Talasalapang	BRI Syekh yusuf	29,000 x 5	145,000	RPC
52	MUHAJJI					
53	.....	Jl. Rutan	RUTAN	25,000 x 6	150,000	RPC
54	RAMLI	Jl. Pengayoman	Bintang HP	100,000 x 7	700,000	PNK
55	SUARDI					
56	SANDI	Jl. Pengayoman	Toko Alaska Mobil			
57	DG. SIBALI					
58	DG. BETA					
59	BOCA (SULATAN)					
60	MUH. AGUS			300,000 x 7	#####	PNK
61	HAYA					
62	MUHAJIR		Lavita			
63	JAMAL JUNAID					
64	RUSLI NURPASANG					
<b>TOTAL</b>					<b>#####</b>	

**Makassar, 07 DES 2015**

**Disetujui,**

**Dibuat Oleh**

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**LANDAU**  
Kolektor

**Diketahui,**

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

**WILAYAH** : EMPAT BELAS  
**NAMA KOLEKTOR** : WAWAN GUNAWAN  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	MASSE	Jl. P. Kemerdekaan	Bank MandiriCbg Daya	23,000			BKNAYA
2	DG. LURANG	Jl. P. Kemerdekaan	Foto Cofy 55	10,000			TMLNREA
3	YANCE ANDARIAS TANKE	Jl. P. Kemerdekaan	Holland	38,000	38,000	38,000	TMLNREA
4	PALATTUANG						
5	MUSTAKIN	Jl. P. Kemerdekaan	Panen Raya	10,000			TMLNREA
6	MUCHTAR	Jl. P. Kemerdekaan	Pasar Mode	20,000	20,000	20,000	TMLNREA
7	RONI						
8	ISMAIL	Jl. P. Kemerdekaan	Raja Boga	35,000	35,000	35,000	TMLNREA
9	ALEX DARTO						
10	MUH. FAHRUL						
11	DUKE	Jl. P. Kemerdekaan	Zazil Bakeri	10,000			TMLNREA
12	SUGIONO	Jl. P. Kemerdekaan	LESEHAN DAMAI 2	20,000	20,000	20,000	TMLNREA
13	NA'GA	Jl. P. Kemerdekaan	KANTOR POS				
14	HASAN SAPANDI	Jl. P. Kemerdekaan	Gelael	10,000	10,000	10,000	BKNAYA
15	BAHAR	Jl. P. Kemerdekaan	BINTANG PERINTIS	15,000	15,000	15,000	BKNAYA
16	ABDULLAH	Jl. BTP. Tamalanrea	BRI BTP TAMALANREA	25,000			TMLNREA
17	ARMAN	Jl. BTP. Tamalanrea	Sinar Warna	28,000			TMLNREA
18							
	ANJAS	Jl. BTP. Tamalanrea	MIE NAGA BTP			60,000	
19	MURSALIM ABDULLAH	Jl. BTP. Tamalanrea	WARKOP SIJA	10,000	10,000	10,000	TMLNREA
20	ZAENI DG. NGALLI	Jl. BTP. Tamalanrea	Coto Tamalanrea	12,000	12,000	12,000	TMLNREA
21	DG. NGALLE	Jl. BTP. Tamalanrea	Sari Laut Lasdi				TMLNREA
22	SAPRI	Jl. BTP. Tamalanrea	RM. Sura Madu				TMLNREA
23	MUSTARI	Jl. Kapasa Raya	BRI Kapasa	15,000			BKNAYA
24	SAMSUDDIN	Jl. Paccerakkang	BRI Paccerakkang	20,000			BKNAYA
25	ERWIN	Jl. Baddoka	PLN			100,000	BKNAYA
JUMLAH				301,000	160,000	320,000	

Makassar,01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
 Ka. Bagian Pengelolaan

**WAWAN GUNAWAN**  
 Kolektor

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
 Direktur Operasional

**WILAYAH** : LIMA BELAS  
**NAMA KOLEKTOR** : SUNAR  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	M.ARIFIN	Jl. P. Kemerdekaan	Aneka Jaya	18,000	18,000		TMLNREA
2	SYAFARUDDIN	Jl. P. Kemerdekaan	Coto Paraikatte (Siang)	34,000	34,000	34,000	TMLNREA
3	M. SABIR						
4	ALIMUDDIN DG. NANRING						
5	ARSYAD	Jl. P. Kemerdekaan	Depan K24	18,000	18,000	18,000	BKANAYA
6	M. USMAN						
7	ASWAN	Jl. P. Kemerdekaan	Depan MTM	17,000	17,000	17,000	TMLNREA
8	BASRI DG. TIRO	Jl. P. Kemerdekaan	Depan Ramayana	17,500	17,500	17,500	TMLNREA
9	SOFYAN (MUSTARI)			17,500	17,500	17,500	
10	RIJAL	Jl. P. Kemerdekaan	Pantai Indah	63,000	30,000	30,000	TMLNREA
11	ACH SUADI	Jl. P. Kemerdekaan	Rm. Dani	35,000	35,000	35,000	TMLNREA
12	SIRAJ						
13	SAINUDDIN						
14	TAKBIR NAWAWI	Jl. P. Kemerdekaan	RM. H. Anni	20,000	20,000	20,000	TMLNREA
15	TAKBIR						
16	JUMARIAH	Jl. P. Kemerdekaan	RM. Padang	18,000	18,000	15,000	TMLNREA
17	DHANDY	Jl. P. Kemerdekaan	Rumahku	26,000	26,000	26,000	TMLNREA
18	KAHAR						
19	HAERUL	Jl. P. Kemerdekaan	Suzuki Vinance	5,000			TMLNREA
20	SUHRA	Jl. P. Kemerdekaan	Bakso Minggu	30,000	30,000	30,000	TMLNREA
21	ANSAR NURDIN	Jl. P. Kemerdekaan	Cobe - cobe	12,000	12,000		TMLNREA
22	IRWAN	Jl. P. Kemerdekaan	DEPAN M TOS	35,000	35,000	35,000	TMLNREA
23	RISAL						
24							
25	SAPAK	Jl. P. Kemerdekaan	RM. Lesehan Damai				TMLNREA
26	HAIRUDDIN	Jl. P. Kemerdekaan	RM. Lesehan Damai	25,000	25,000	25,000	
27	HABIBI	Jl. P. Kemerdekaan	BCA	10,000			TMLNREA
28	MANSYUR	JL,URIP S	PISANG NUGGET	10,000	10,000	10,000	PNK
29	SYAHRIR DG. SILA	Jl. Panaikang	BRI Panaikang	26,000	6,000		PNK
30	ILALUDDIN						
31	RAHMAT	JL. TAMAN MAKAM PA	BAKSO MJ	15,000	15,000		PNK
32	ABD. SALAM	Jl. Urip Sumoharjo	Sop Saudara	38,000	38,000	38,000	PNK
33	SANGKALA						
34	ANDIKA	Jl. Urip Sumoharjo	Coto Maros	22,000	22,000	22,000	PNK
35	SYARIFUDDIN	Jl. Urip Sumoharjo	ALFA MIDI	18,000	18,000		PNK
36	IRFAN JAMAL	Jl. Urip Sumoharjo	LAMONGAN	19,000	19,000	19,000	PNK
37	S. JAFAR/SYAHRIR/ARMAN	Jl. Urip Sumoharjo	COTO NUSANTARA 3	15,000	15,000	15,000	PNK
38	HAMKA	Jl. Urip Sumoharjo	Cahaya Jaya	10,000			PNK
39	BURHANUDDIN	Jl. Urip Sumoharjo	Sari laut mbak lia	10,000	10,000	10,000	PNK
40		Jl. Urip Sumoharjo	Circle	10,000	10,000	10,000	PNK
41	YUSRAN	Jl. Urip Sumoharjo	Empek-Empek			45,000	PNK
42		Jl. Urip Sumoharjo	Kios Atiraja			30,000	PNK



43		Jl. Urip Sumoharjo	Alva Mart awal bros	5,000	5,000	5,000	PNK
44		Jl. Urip Sumoharjo	Martabak Medan	10,000	10,000		MKS
45	RUSLAN	Jl. Urip Sumoharjo	BRI	10,000			MKS
46	SAPARUDDIN	Jl. ABD. Dg. Sirua	BRI	15,000			PNK
47	AZIS DG. TONA	Jl. ABD. Dg. Sirua	Coto Dg. Sirua			315,000	PNK
48	AMBO	Jl. ABD. Dg. Sirua	INDOMARET	10,000	10,000	10,000	PNK
49	IWAN	Jl. ABD. Dg. Sirua	Puskesmas	5,000			PNK
50	A. GUNARDI	Jl. Racing Centre	Es. Teler Racing	20,000	20,000	20,000	PNK
51		Jl. Batua Raya	INDOMARET	5,000	5,000		PNK
52	BURHANUDDIN	Jl. A.P.Pettarani	Sari Laut (Mas Joko Ujun	50,000	50,000	50,000	PNK
53		Jl. A.P.Pettarani	RM. Jakarta Malam	10,000	10,000	10,000	PNK
54	I.KM. SEMARA	Jl. A.P.Pettarani	Sop Saudara Pangkep	20,000	18,000	18,000	PNK
55	SYARIFUDDIN	Jl. Maccini raya	Nasi Kuning Bagadang	16,000	16,000	16,000	PNK
56	MUH.YUSUF						
57	IQSAN	Jl. AP. Pettarani	PlayOver SOP SAUDARA	18,000	18,000		PNK
58	IBRAHIM	Jl. Saripah	Djuries Coffee			60,000	PNK
<b>JUMLAH</b>				<b>793,000</b>	<b>683,000</b>	<b>1,028,000</b>	

**Makassar,01 DES 2015**

**Disetujui,**

**Dibuat Oleh**

**DRS. MA'MUR SAID**  
**Ka. Bagian Pengelolaan**

**SYAMSUNAR**  
**Kolektor**

**Diketahui,**

**SYAFRULLAH, SE**  
**Direktur Operasional**

WILAYAH : ENAM BELAS  
NAMA KOLEKTOR : DANIAL  
DAFTAR TAHUN : 2015  
TAGIHAN : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	IKSAN/GASSING.K	Jl. Boulevard	NASI UDUK	12,000	12,000	12,000	PNK
2	MARSUKI	Jl. Boulevard	RM MARENG	84,000	84,000		PNK
3	ANCU SYAMSUDDIN						
4	DG SEWANG						
5	SYARIFUDDIN	Jl. Boulevard	Bank BRI	65,000	-		PNK
6	ALIMUDDIN	Jl. Boulevard	E. Club Bemyanyi				PNK
7	SYARIFUDDIN DG. MATTA	Jl. Boulevard	Nav 1	43,000	43,000	43,000	PNK
8	RUSTAM M			37,000	37,000	37,000	
9	MUSTARI B.	Jl. Boulevard	Warkop. Zone	pak.toni	pak.toni		PNK
10	GASSING DG. KULLE						
11	BAHA	Jl. Boulevard	warkop Sami	20,000	20,000		PNK
12	JOMNY KURNIAWAN			20,000	20,000		
13	AJIS DG. LIMPO	Jl. Boulevard	Bank B I I	20,000			PNK
14	RAHMAN DG. NYALA	Jl. Boulevard	Bank BCA	93,000	45,000	50,000	PNK
15	DG. ROPU						
16	ILHAM PANJAITAN						
17	ADI SUPARMAN						
18	SUDARTO MAULANA			50,000	50,000	50,000	
19	SUWANDY	Jl. Boulevard	Bank Danamon	54,000			PNK
20	ANTONIUS STEFEN						
21	M. DAVID. M	Jl. Boulevard	Bank Mandiri	255,000	40,000	20,000	PNK
22	TIAR				45,000		
23	KARIM						
24	MUH. AMIR DG. TARANG	Jl. Boulevard	Bank Niaga (siang)	150,000	50,000	30,000	PNK
25	RUDI						
26	USMAN DG. KULLE						
27	M. YUSUF DG. RONRONG						
28	KELLU'						
29	SUARDI/KANAN	Jl. Boulevard	Bank Nisp	46,000			PNK
30	PAULUS YOHAN A. MASSE	Jl. Boulevard	Cave Boulevard Malam	28,000	28,000		PNK
31	IKBAL	Jl. Boulevard	Crispy/Toshiba	35,000	35,000	35,000	PNK
32	SOPYAN DG. NAI	Jl. Boulevard	BNI Boulevard	40,000	40,000	40,000	PNK
33	RUSLAN	Jl. Boulevard	Fizik (BCA Lama)	15,000	-	-	PNK
34	AGUS WALA	Jl. Boulevard	Warkop Sija	55,000	55,000	30,000	PNK
35	MUNSIR						
36	TINGGI	Jl. Boulevard	Rewa	10,000	10,000	10,000	PNK
37	HASANUDDIN NUR	Jl. Boulevard	Mie Titi	340,000	340,000	340,000	
38	ABD. HALIM DG. TATA						
39	ABD. HALIM						
40	NASIR						

41	AGUS RAHMAN ALIM. M						
42	INDRA IRAWAN						
43	FANDY DARWIS	Jl. Boulevard	Cuci Helm/Warkop NH	30,000	30,000	30,000	PNK
44	HAERUL AMIR						
45	FAISAL MUIS						
46	ANDI ANSARI RM	Jl. Boulevard	Panti Pijat Kartika/Bakso L Temb	90,000	90,000	90,000	PNK
47	LAODE M. TAUFIK						
48	HASAN	Jl. Boulevard	Pegadaian	45,000	45,000	45,000	PNK
49	RUDY	Jl. Boulevard	ONE KARAUKE	40,000	40,000	40,000	PNK
50	HERMAN						
51	IKBAL	Jl. Boulevard	Jasper Salon/Sop Saudara	35,000	35,000	35,000	PNK
52	MAKKA						
53	DG. REWA						
54	SAHRIL	Jl. Boulevard	RM. Cobe-cobe/apong	85,000	85,000	85,000	PNK
55	SALAHUDDIN						
56	BASRI DG. NGESA						
57	SYAHRIL						
58	ALAM						
59	ABD. GAFFAR	Jl. Boulevard	Sutra Indah DSKT	26,000	26,000	20,000	PNK
60	HARUL PANJAITAN						
61	SAHANUDDIN	Jl. Boulevard	Tiki SIANG	130,000	130,000		PNK
62	HAKIM		shif malam				
63	MUSTARI	Jl. Boulevard	Toko Ende Jaya	46,000	46,000		PNK
64	YORI SALAWATI	Jl. Boulevard	Toko Evalution Comp	40,000	40,000	40,000	PNK
65	M. AMIN AMINUDDIN		shift				
66	JAFAR NGINTI	Jl. Boulevard	Warkop Poenam	pak.toni	pak.toni		PNK
67	TAHIR DG. LOLO	Jl. Boulevard	PHOTO FUJI FILM	26,000	26,000		PNK
68	MUNAWIR	Jl. Boulevard	Cave BOULEVARD Siang	20,000	20,000		PNK
69	MUH TAUFIK MUNTU	Jl. Boulevard Raya	Kios Dewata	70,000	70,000	70,000	PNK
70	IRFAN ABD						
71	ALI SAID	Jl. Boulevard Raya	AYAM PENYET	100,000	50,000	20,000	PNK
72	SAHARUDDIN						
73	ISNAENI.S	Jl. Boulevard	Ruko Bisnis (Toko Buah)	15,000	15,000	15,000	PNK
74	SYAHRIR. YOH						
75	YACAN						
76	ARIFIN						
77	RIDWAN DG. NGAGO						
78	DG. NGAWING	Jl. Pandang Raya	Depan Mesjid/Samping Carrefor	85,000	85,000	85,000	PNK
79	AWIN .S (KECIL)						
80	FADLI RACHMAN						
81	MUH. KASIM DG,NABA						
82	JANUARI DG. SUNGGUH	Jl. Topaz	Belakang Ramayana (MLM)	110,000	110,000		PNK
83	SYARIFUDDIN		shift				
JUMLAH				2,465,000	1,897,000	1,222,000	

JL. ADIYAKSA BARU	AYAM GORENG CRISPY	10,000	10,000		UNJUNG
JL. ADIYAKSA BARU	BEBEK GORENG	Rp 10,000	Rp 10,000		UNJUNG SIL
#####					

**WILAYAH** : DUA PULUH TIGA (WIL.PENGAYOMAN PEMEKARAN 2)  
**NAMA KOLEKTOR** : RIZAL BAHAR  
**DAFTAR TAHUN** : 2016  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	DG TAMMU	Jl. Toddopuli Raya	INDOMARET TODDOPULI	5,000	5,000	5,000	PNK
2	DG. SITUJU	Jl. Toddopuli	ADIRA	30,000			PNK
		Jl. Pengayoman	KIOS LOMBOK	13,000	13,000	13,000	
3	AMININ	Jl. Pengayoman	Warkop KORNER	22,000	22,000	22,000	PNK
4	MUHAMMAD TAUFIQ	Jl. Pengayoman	Kiddy	80,000	80,000	80,000	PNK
5	KAMARUDDIN						
6	RUDDIN	Jl. Pengayoman	Penjual Martabak	20,000	20,000	20,000	PNK
7	NIRMAWANTO	Jl. Pengayoman	Raja Boga	70,000	70,000	70,000	PNK
8	TATO	Jl. Pengayoman	Sop Saudara/KONRO	50,000	50,000	50,000	PNK
9	SALASING						
10	RAHMAT	Jl. Pengayoman	Bank BRI	55,000			PNK
11	TALIB. DG. NUNTUNG	Jl. Pengayoman	RM. Mie Ceng	30,000	30,000	30,000	PNK
12	ITO PRATAMA			90,000	90,000	90,000	
13	JAMAL	Jl. Pengayoman	Elektronik Depan Diva	15,000	15,000	15,000	PNK
14	ELIS DG REWA	Jl. Pengayoman	TOKO ELVIRA	15,000	15,000	10,000	
16	USMAN DG. RANI	Jl. Pengayoman	Raja Murah	15,000	15,000	15,000	
17	SERVASIUS KARLOS	Jl. Pengayoman	Toko KFC	200,000	200,000	200,000	
18	JUMANAI						
19			WARKOP APPING	10,000	10,000	10,000	
20	SYAMSUDDIN	Jl. Pengayoman	Metro Spa	34,000	34,000	34,000	PNK
21	ABU BAKAR	Jl. Pengayoman	Bank BNI Malam	28,000	28,000	15,000	
22	BASRI DG. RANGKA		shif pagi	130,000			
23	JAMALUDDIN		shif sore	25,000	25,000		
24	MUSTAPA		shif pagi				
		Jl. Pengayoman	INDOMARET	15,000	15,000	15,000	
25	MASRI DG. BETA	Jl. Pengayoman	JAKARTA TAYLOR	23,000	23,000	23,000	
26	SARIPUDDIN	Jl. Pengayoman	RM. Raja Gurih	30,000	30,000	30,000	
27	RAMLI HASAN	Jl. Pengayoman	Bank Bukopin	60,000			PNK
28							
29	SAMPARA	Jl. Pengayoman	Ati Raja	37,000	37,000	37,000	
30	BURHANUDDIN RAHMAN	Jl. Pengayoman	Foto Golden	27,000	27,000	27,000	
31	IRVANDI						
32	SUL DG. SIKKI	Jl. Pengayoman	SAMPING SUPER MODE	15,000	15,000	15,000	
33	LUMISU. K BARATIKU	Jl. Pengayoman	Super Mode	80,000	80,000	80,000	
34	SIMON MARAMPA						
35	SAHABUDDIN BATE	Jl. Pengayoman	Duta Irama	21,000	21,000	21,000	
36	DG. SANGKALA DG. GASSING	Jl. Pengayoman	Toko Roti Candi	55,000	55,000	55,000	
37	SUGIANTO	Jl. Pengayoman	Tk. Harapan Baru	25,000	25,000	25,000	
38	SUYITNO						
39	PEPE	Jl. Pengayoman	BRI Malam	15,000	15,000	15,000	PNK
40	HANAI DG. RATE	Jl. Pengayoman	Muratonji/BRI SIANG	35,000	35,000	35,000	
41	DG NGAWING	Jl. Pengayoman	Nasi Goreng/ KAKI KAMBING	10,000	10,000	10,000	

42		JL. Pengayoman	INDOMART SMPG KAKIKAMBING	13,000	13,000	13,000	
44	BUDI SANTOSA	JL. Pengayoman	Ardan Masogi	20,000	20,000	20,000	
45	S. DG. BELLA	JL. Pengayoman	Coto daeng	50,000	50,000	50,000	
46	EDYANDRO						
47	LIDO						
48	SYAMSUDDIN	JL. Pengayoman	Nokia Sic 2000	27,000	27,000	27,000	
49	MUHAMMADONG SJ.	JL. Pengayoman	KB. Sweet Memory	10,000	10,000	10,000	
50	DG NABA	JL. Pengayoman	Atiraja/ALACOFFE ALABAIK	37,000	37,000	37,000	
51	KADIR DG. DONGKO	JL. Pengayoman	Kroket Sulawesi	40,000	40,000	40,000	
52	UDIN	JL. Pengayoman	Bakso Faforit	25,000	25,000	25,000	
53	HOA/SYAMSUDDIN	JL. Pengayoman	CK	10,000	10,000	10,000	
54	SYARIFUDDIN	JL. Pengayoman	jalankote lasinrang	18,000	18,000	18,000	
55	JAMALUDDIN	JL. Pengayoman	Hermin Salon	23,000	23,000	23,000	
56	DG. MILE	Jl. Bougenville	BKMD	25,000	25,000	25,000	
57	ARIF						
58	DG. NGERO	Jl. Bougenville	RM. Marem	10,000	10,000		
59	TUAN USMAN	Jl. Bougenville	Distro Issue	50,000	50,000	50,000	
60	DG. MILE	Jl. Bougenville	Warkop Depn BKMD/LOPI	20,000	20,000	20,000	
61	SYAMSUDDIN	Jl. Bougenville	B A F SIANG	35,000	35,000		
62	REWA	Jl. Bougenville	BAF MALAM	15,000	15,000	15,000	
		Jl. Bougenville	SAMPING MP	15,000	15,000	15,000	
		Jl. Bougenville	KOPI TORAJA			70,000	
	PEPE	Jl. Pengayoman	INDOMARET	30,000	30,000	30,000	
63	MUHAMMAD NURUN	Jl. Pengayoman	GOL CITY/DAPUR COKLAT ML	10,000	10,000	10,000	
64	DG. LAU	JL. Pengayoman	Dapur Coklat	15,000	15,000	15,000	
65	SYAMSUDDING DG. ROA	Jl. BAU Mangga	TOKO KUE	20,000	20,000	20,000	
66	DG. RUDDIN						
67	DG. TUNTUNG	JL. Pengayoman	Mitsuko/NATASYA	55,000	55,000	30,000	
68	DG. TANGNGA						
69	M. DG. SITABA	JL. Pengayoman	ABC TOYS	15,000	15,000	15,000	
70		JL. Pengayoman	KAFE FROZY	10,000	10,000	10,000	
71	RIAN	JL. Pengayoman	ERHA CLINIC	20,000	20,000		
72	TAKING	JL. Pengayoman	Pruit Market	76,000	76,000	76,000	
73	YAHA						
74	MUH. TAKBIR ARSYAD	JL. Pengayoman	Depo Indra Bngunan/Internet	65,000	65,000	-	
75	ANDI FAISAL	JL. Pengayoman	DEPAN DEPO INDRA BANGUNAN				
76	FETRUS			20,000	20,000		
77	ABD. RASYID/BAHAR/ARMAN	JL. Pengayoman	ALVA MIDI	20,000	20,000	20,000	
78	MAMU DG. SIBALI	JL. Pengayoman	Computer City	80,000	80,000	80,000	
79	MURSALIM						
80	SYAMSUDDIN. B	JL. Pengayoman	Depan RS.Bunda	13,000	13,000	13,000	
81	DG. NGEPEPE	JL. Pengayoman	Toko Roti Donalson	60,000	60,000	60,000	
82	SAHRUL RAJAB						
		JL. Pengayoman	RUKO PUNGOPANG				
83	NGITUNG	JL. Pengayoman	RM. UJUNG PANDANG	33,000	33,000	33,000	
84	DOLLO HAJJI DG. NAMBUNG	JL. Pengayoman	Rental Adira	23,000	23,000		
85	TOMO	JL. Pengayoman	Bakso Minggu	20,000	20,000	20,000	
86	YAMIN	JL. Pengayoman	ADIRA	35,000	35,000	35,000	

87	AMAR TAUFIK	JL. Pengayoman	K. 24	50,000	50,000	50,000	
88	ANDI SUARNO						
89	SANGKALA DG. MUANG	JL. Pengayoman	Kafe Gigi/AYAM PENYET	71,000	71,000	71,000	
90	SYAHRUNI	JL. Pengayoman	ATM BCA	40,000	40,000	40,000	
91	KAMARUDDIN						
92	IRFAN	JL. Pengayoman	Orange/R.M Lagaligo				
93	M. HAMKA			40,000	40,000	40,000	
94	MUH. SARIF						
95	IRFAN ABDULLA						
96		JL. Pengayoman	THE PROJET KAFE				
97	ICCANG	JL. Pengayoman	Nasi Goreng	15,000	15,000	15,000	
98		JL.AP.PETTARANI	HOLLAND	25,000	25,000	25,000	
99	DG UPA	JL.TODDOPULI	PASAR TODDOPULI	35,000	35,000		
100	ALFIAN PK			62,000	62,000	55,000	
101	H.MUH. SYAMSIR						
102	MADDIN			38,000	38,000		
103	HARUN HAYAT						
104	DG MUSA			40,000	40,000	40,000	
105	HERI ASO			18,000	18,000	18,000	
106	USMAN			30,000	30,000	30,000	
107	MUSLIMIN DG NUJU						
108	HARIS			30,000	30,000	30,000	
109	PATTA SYAMSUDDIN						
110	HARUNA DG SIKKI			20,000	20,000	20,000	
111	SYARIFUDDIN DG NAI			20,000	20,000	20,000	
112	MUH TAHANG	BORONG	BRI	13,000			
113	HAMZAH ACHMAD	ANTANG	BRI	17,000			
114	RUSTAM S	ANTANG	BNI	13,000			
115		ANTANG	COTO GAGAK	10,000	10,000		
116		ANTANG	PASAR ANTANG			105,000	
JUMLAH				3,035,000	2,717,000	2,561,000	

**WILAYAH** : DELAPAN BELAS  
**NAMA KOLEKTOR** : MUHAMMAD YUSUF  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	HASAN	Jl. Butung	Pasar Butung	30,000	30,000	30,000	WAJO
2	HUSEN	Jl. Butung	Pasar Butung	30,000	30,000	30,000	WAJO
3	M. YUSRAN A	Jl. Butung	Pasar Butung	23,000	23,000	23,000	WAJO
4	BUSRAH						
5	MUTHALIB	Jl. Butung	Pasar Butung	35,000	35,000	35,000	WAJO
6	JUMADI	Jl. Butung	Pasar Butung	25,000	25,000	25,000	WAJO
7	ICAL						
8	DARMAWAN	Jl. Kalimantan	Pasar Butung	30,000	30,000	30,000	WAJO
9	EDO SETIYAWAN	Jl. Kalimantan	Pasar Butung	30,000	30,000	30,000	WAJO
10	BACHTIAR	Jl. Kalimantan	Pasar Butung	20,000	20,000	20,000	WAJO
11	IRWAN	Jl. Kalimantan	Pasar Butung	23,000	23,000	23,000	WAJO
12	SAPRI	Jl. Kalimantan	Pasar Butung	18,000	18,000	18,000	WAJO
13	MAIN DG. RATE	Jl. Hos Cokro Aminoto	Toko Agung Sentral	20,000	20,000	20,000	WAJO
14	SUDIRMAN	Jl. Hos Cokroaminoto	Bundaran Pos Polis	30,000	30,000	30,000	WAJO
15	H. ISKANDAR			30,000	30,000	30,000	
16	IDOL						
17	MUH. GASSING	Jl. Hos Cokroaminoto	DPN H. Kalla	30,000	30,000	30,000	WAJO
18	SODIKIN	Jl. Hos Cokroaminoto	Harmonis	15,000	15,000	15,000	WAJO
19	MADE ALI	Jl. Hos Cokroaminoto	Makassar Mall	13,000	13,000	13,000	WAJO
20	GASSING	Jl. Hos Cokroaminoto	Sentral Jaya (sORE)	20,000	20,000	20,000	WAJO
21	ARNOLD						
22	LUKMAN	Jl. Hos Cokroaminoto	Toko Sepatu bata	10,000	10,000	10,000	WAJO
23	LAYAR	Jl. Hos Cokroaminoto	Lorong Tangjung Piring	5,000	5,000	5,000	WAJO
24	A. HALIDOK	Jl. KH. Agus Salim	Makassar Mall	33,000	33,000	23,000	WAJO
25	ABD. RASYID						
26	SYAMSUDDIN	Jl. KH. Agus Salim	Makassar Mall	17,000	17,000	17,000	WAJO
27	TEPU DG. GASSING	Jl. KH. Agus Salim	Makassar Mall (ISTANA G	11,000	11,000	11,000	WAJO
28	JAMALUDDIN	Jl. KH. Hasyim	Makassar Mall	18,000	18,000	18,000	WAJO
29	MUIS	Jl. KH. Hasyim	Makassar Mall (TOKO ALI	20,000	20,000	20,000	WAJO
30	MUSTAFA	Jl. KH. Hasyim	Makassar Mall	40,000	40,000	35,000	WAJO
31	BAHAR	Jl. KH. Hasyim	Makassar Mall	15,000	15,000	15,000	WAJO
32	ILHAM	Jl. KH. Hasyim	Makassar Mall (PADI MAS	15,000	15,000	15,000	WAJO
33	AMIRUDDIN	Jl. KH. Ramli	Makassar Mall (Toko Tuju	12,000	12,000		WAJO
34	BAKRI	Jl. KH. Ramli	Makassar Mall (Apt. Selan	10,000	10,000		WAJO
35	LIAS	Jl. KH. Ramli	Makassar Mall (Sejahtera)	20,000	20,000	20,000	WAJO
36	NYAMBANG						
37	ABD JALIL						
38	P DG TOMPO	Jl. Layya	Toko AT	10,000	10,000		WAJO
39		Jl. Bulusaraong	Toko Glodok	10,000			WAJO
40		Jl. Bulusaraong	RM. Oke	7,000	7,000		WAJO

41	RUSLAN	Jl. Bulusaraung	Samping Glodok	5,000	5,000		WAJO
42	FIRSAN	Jl. Bulusaraung	Depan Toko Kaset	10,000	10,000		WAJO
43	M.HAKIM	Jl. Bulusaraung	Akademis ( Malam-SIANG	73,000	73,000	73,000	WAJO
44	MUH. SALEH DG. TIKA						
45	H. TEPING			73,000	73,000	73,000	
46	SYAMSU						
47	BAHAR	Jl. Bulusaraung	Aquar S. Sic. 2000/Matrix	43,000	43,000	43,000	WAJO
48	HAERUDDIN	Jl. Bulusaraung	Samping BNI 46	28,000	28,000	28,000	WAJO
49	DG. NGERANG	Jl. Bulusaraung	T. HP. & Roxii	38,000	38,000	38,000	WAJO
50	SYARIFUDDIN	Jl. Bulusaraung	Tk. Aspira Alat Motor	15,000	15,000		WAJO
51	BAHAR	Jl. Bulusaraung	MIAKO	18,000	12,000		WAJO
52	KAMARUDDIN	Jl. S. Cerekang	Dr.Hans	15,000			BONTOALA
53	SAMPARA DG. NEMBA	Jl. S. Cerekang	Sarabba	16,000	16,000	16,000	BONTOALA
54	ISMAIL			29,000	29,000	29,000	
55	SANI	Jl. S. Cerekang	TK. Inti Sel (HP)	15,000	15,000		BONTOALA
56	SAHABUDDIN	Jl. S. Cerekang	Toko Jumbo HP	24,000	24,000		BONTOALA
57	YANCE						
58	BURHANUDDIN	JL. Gatot Subroto	Coto	10,000	10,000	10,000	TALLO
59	ABD. AZIS	Jl. Bayang	Ikan Baka Pasar Terong	10,000	10,000		BONTOALA
60	M. HALIM	JL. TEUKU UMAR	Sop Saudara	17,000	17,000	17,000	TALLO
61	ACO	JL. TEUKU UMAR	coto makassar	15,000	15,000	15,000	TALLO
62	HERMAN	Jl. DATUK DITIRO	COTO DATUK DITIR	10,000	10,000	10,000	ILHAM
TOTAL				1,169,000	1,138,000	993,000	

Makassar,01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**MUHAMMAD YUSUF**  
Kolektor

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

WILAYAH : SEMBILAN BELAS  
NAMA KOLEKTOR : UMAR  
DAFTAR TAHUN : 2015  
TAGIHAN : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET			KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	
1	SURIANI	Jl. Bawakaraeng	Pasar Terong	35,000	35,000	35,000	BONTOALA
2	SYAHRUDDIN						
3	JABAL NUR (ALEX)	Jl. Kangkung	Pasar Terong	16,000	16,000	tutup	BONTOALA
4	.....						
5	DG. JARRE	Jl. Labu	Pasar Terong	37,000	37,000	25,000	BONTOALA
6	ASMUDDIN MUNIR	Jl. Masjid Raya	Pasar Terong	10,000	10,000		BONTOALA



7	MARZUKI	Jl. Mesjid Raya	BRI	28,000			BONTOALA
8	DG. NGAMBE	Jl. Mesjid Raya	Pasar Terong/Toko Sun	28,000	28,000	tutup	BONTOALA
9	S.DG. NAPPA	Jl. Hati Murni	Pasar Sambung Jawa	20,000	20,000	20,000	MRISO
10	MUHAMMAD LOMPO	Jl. Hati Murni	Pasar Sambung Jawa	18,000	18,000	18,000	MRISO
11	CHAIRIL DG. MILE	Jl. Hati Suci	Pasar Sambung Jawa	25,000	25,000	25,000	MRISO
12	MANSYUR	Jl. KS.Tubun	Pasar Senggol	20,000	20,000	20,000	MRISO
13	NASARUDDIN	Jl. KS.Tubun	Pasar Senggol	18,000	18,000	18,000	MRISO
14	DG. SIRIWA (ROBERT)	Jl. KS.Tubun	Pasar Senggol	5,000	5,000	7,000	MRISO
15	MUH. RAYU	Jl. Latimojong	Pasar SawaH	25,000	25,000	25,000	MKS
16	DG. UPA	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
17	ALFIAN PK	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
18	H.MUH.SYAMSIR	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
19	MADDIN						
20	HARUN HAYAT						
21	DG. MUSA	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
22	HERI ASO	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
23	USMAN	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
24	MUSLIMIN DG. NUJU	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				
25	HARIS	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
26	PATTA SYAMSUDIN						
27	HARUNA DG SIKKI	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
28	SYARIFUDDIN DG. NAI	Jl. Toddopuli	Pasar Toddopuli				PNK
29	LEO	Jl. Terong	Pasar Terong	23,000	23,000		BONTOALA
30	PALIANG	JL. KS TUBUN	PASAR SENGGOL	25,000	25,000	25,000	MRISO
31	TIGOR			5,000	5,000	5,000	
32	MUH. TAHANG	JL. BORONG	BRI				MANGGALA
33	HAMZAH ACHMAD	Jl. Antang	BRI ANTANG				MANGGALA
34	RUSTAM. S	Jl. Antang	Bank BNI				MANGGALA
35		Jl. Antang	COTO GAGAK				MANGGALA
36		Jl. Antang	Pasar Antang				MANGGALA
JUMLAH				338,000	310,000	223,000	

Makassar,01 DES 2015

Disetujui,

Dibuat Oleh

**DRS. MA'MUR SAID**  
Ka. Bagian Pengelolaan

**UMAR**  
Kolektor

Diketahui,

**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

**WILAYAH** : (SEKOLAH)  
**NAMA KOLEKTOR** : MUSTAMIN  
**DAFTAR TAHUN** : 2015  
**TAGIHAN** : HARI SENIN S/D MINGGU

NO.	NAMA JURU PARKIR	ALAMAT TUGAS	TEMPAT TUGAS	TARGET				KET
				SENIN S/D JUM,AT	SABTU	MINGGU	MINGGU	
1	ASWAR	Jl. Ra. Kartini	SD. Athirah	15,000		-		UP
2	DG. NOMPO ASMA	Jl. Kajaolalido	SD. Athirah	10,000		-		
3	MUHAMMAD IJAS	Jl. Kajaolalido	SD. Athirah	10,000		-		
4	NURUL IQBAL	Jl. Kajaolalido	SD. Athirah	15,000		-		
5	A. SULTAN	Jl. Arief Rate	SMP Rajawali	10,000	10,000	-		
6	HARIADI DG. SIJAYA	Jl. Arief Rate	SMP Rajawali	10,000	10,000	-		
7	HENDRIK	Jl. Arief Rate	SMP Rajawali	10,000	10,000	-		
8	ARMAN	Jl. Arief Rate	SMP Rajawali	10,000	10,000	-		
9	SUARDI DG. LIRA	Jl. Arief Rate	SMP Rajawali	10,000	10,000	-		
10	SAHARUDDIN LALANG	Jl. Bonto Lempang	SD. Mangkura	15,000	15,000	-		
<b>JUMLAH</b>				<b>115,000</b>	<b>65,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Makassar, 12 Oktober 2015**

**Disetujui,**

**Dibuat Oleh**

**DRS. MA'MUR SAID**  
 Ka. Bagian Pengelolaan

**MUSTAMIN**  
 Kolektor Wil. .

**Diketahui,**

**SYAFRULLAH, SE**  
 Direktur Operasional



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**PD. PARKIR MAKASSAR RAYA**

Jl. Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 022/10-UM/I/2016

Pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAFRULLAH, SE**  
Jabatan : Direktur Operasional  
Nama Instansi : PD. Parkir Makassar Raya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa UNIVERSITAS HASANUDDIN dibawah ini :

Nama : **Aulia Bisri Agussalim**  
Nim : B12112171  
Jurusan : Hukum Administrasi Negara  
Alamat : Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok. AB No. 62,  
Makassar  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam memungut Retribusi Parkir".**

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Instansi kami dari Tanggal **28 Desember 2015 s/d 28 Januari 2016**, berdasarkan Surat Permohonan Izin melakukan Penelitian Nomor : **070/578-II/BKBP/XII/2015**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Januari 2016  
Direksi Perusahaan Daerah  
Parkir Makassar Raya

  
**SYAFRULLAH, SE**  
Direktur Operasional

Tembusan :

1. Yth. Direktur Utama PD. Parkir Makassar Raya sebagai Laporan
2. Yth. Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya
3. Arsip